



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**



SEKURITISASI ISU IMIGRAN DALAM OPERASI SOPHIA

TAHUN 2015-2018

Diajukan oleh:

Muhammad Sahab Sahar

16323019

**STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020

**SEKURITISASI ISU IMIGRAN DALAM OPERASI SOPHIA
TAHUN 2015-2018**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memenuhi
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional**



Diajukan oleh

Muhammad Sahab Sahar

16323019

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

SEKURITISASI ISU IMIGRAN DALAM OPERASI SOPHIA

TAHUN 2015-2018

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional Fakultas
Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat

Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

4 November 2020

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Pt Ketua Program Studi

(Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A)

NIK. 123230101

Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1. Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int. , M.A.

2. Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A.

3. Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.



PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Muhammad Sahab Sahar
No. Mahasiswa : 16323019
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Sekuritisasi Isu Imigran dalam Operasi Sophia
Tahun 2015-2018

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 10 November 2020

Yang menyatakan



Muhammad Sahab Sahar

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirobbil'amin

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk orang-orang yang aku cintai dan aku sayangi:

“Kedua Orang Tuaku”

Ucapan banyak terima kasih kepada kedua orang tua, yaitu Ayahanda A.M. Buchari Sahar dan Ibunda Ainin S. Muhibat yang telah memberikan do'a, semangat, pengorbanan, dukungan, nasehat, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.

“Kakakku”

Ucapan terima kasih kepada saudaraku tersayang M.S. Thoha Sahar dan saudariku Dhilah Juas Ainun atas semua do'a, semangat, dukungan, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini

HALAMAN MOTTO

“Tuhan tidak merubah nasib suatu Bangsa sebelum Bangsa itu merubah nasibnya”

Ir. Soekarno~



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Sekuritisasi Isu Imigran dalam Operasi Sophia Tahun 2015-2018” yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional dapat berjalan dengan lancar.

Sholawat serta salam tak lupa senantiasa penulis haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman, yang mana telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini sesuai ketentuan Allah SWT.

Dengan penuh kesadaran, penulisan skripsi ini masih belum sempurna. Namun, penulis telah berusaha dengan kemampuan yang dimiliki semaksimal mungkin agar hasil dari penulisan skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak, terutama bagi para akademisi. Selama penulisan skripsi ini, penulis mengalami banyak kendala, tetapi dengan usaha yang tak henti-hentinya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dengan itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A., selaku Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, yang selama ini telah memberikan banyak ilmu, membimbing, nasihat, saran, dan telah membantu penulis.
4. Bapak Enggar Furi Herdianto S.I.P., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah memberikan bimbingan, ilmu, dan motivasi selama belajar di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Serta telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi serta ilmunya.
5. Ibu Masitoh Nur Rohma S.Hub.Int., M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selama ini telah memberikan bimbingan, motivasi serta ilmunya dari awal penulisan proposal sampai penulisan skripsi ini selesai.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, yang dengan sabar telah memberikan ilmu, motivasi, dan pengalamannya dari awal perkuliahan sampai dengan saat ini.
7. Staf Program Studi Hubungan Internasional, Staf Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Staf Perpustakaan Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kemudahan dan bantuan segala urusan selama ini.
8. Teman-teman dan sahabat di Prodi Hubungan Internasional, yang selama ini telah berbagi kebersamaan, kerjasama, kesenangan dan kesedihan, serta

bantuan dan do'anya. Saya selaku penulis berharap semoga tali persaudaraan kita tidak putus sampai di sini, Amin ya rabbal'amin.

9. Kedua orang tua yaitu Ayahanda A.M. Buchari Sahar dan Ibunda Ainin S. Muhibat yang telah memberikan do'a, semangat, pengorbanan, dukungan, nasehat, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.
10. Saudara kandung yaitu saudaraku M.S. Thoha Sahar dan saudariku Dhilah Juas Ainun yang telah memberikan do'a, semangat, dukungan, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.
11. Terima kasih kepada Felia Rossa Natasya yang telah memberikan do'a, semangat, dukungan, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu baik langsung maupun tidak langsung yang telah membantu selama ini dan selama penulisan skripsi ini.

Saya selaku penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selain itu, selama ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak kekeliruan dan kekurangan, untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan pada masa yang akan datang dan khususnya bagi pengembangan ilmu pada bidang Hubungan Internasional, Amin ya rabbal'amin.

Muhammad Sahab Sahar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Signifikansi Penelitian.....	5
1.5 Cakupan Penelitian.....	6
1.6 Kajian Pustaka.....	7
1.7 Kerangka Pemikiran.....	11
1.8 Metode Penelitian.....	15
1.8.1 Jenis Penelitian.....	15
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	16
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	16
1.8.4 Proses Penelitian	16
BAB II DINAMIKA ISU IMIGRAN DI UNI EROPA	18
2.1 Arus Imigrasi ke Eropa.....	18
2.2 Kebijakan Terkait Imigran di Uni Eropa.....	27

BAB III SEKURITISASI ISU IMIGRAN OLEH UNI EROPA	30
3.1 Konstruksi Isu Imigran sebagai Ancaman Eksistensial	30
3.2 Dampak Konstruksi Isu Imigran sebagai Ancaman Eksistensial	35
3.3 Sekuritisasi dalam Operasi Sophia	42
BAB IV KESIMPULAN.....	51
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Rekomendasi	54
DAFTAR PUSTAKA	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Angka Pengajuan Aplikasi Suaka	19
Gambar 2. Pencari Suaka Berdasarkan Kewarganegaaan 2015.....	20
Gambar 3. Pencari Suaka Berdasarkan Kewaganegaraan 2016.....	21
Gambar 4. Pencari Suaka Berdasarkan Kewarganegaraan 2017	22
Gambar 5. Pencari Suaka Berdasarkan Kewarganegaraan Tahun 2018	23
Gambar 6. Peta Persebaran Imigran dan Rute Mediterrania.....	26
Gambar 7. Grafik Pergerakan Imigran Ilegal.....	36
Gambar 8. Peta Penolakan masuknya Imigran Perbatasan 2018	37
Gambar 9. Operasi Uni Eropa di Laut Mediterania	46



DAFTAR SINGKATAN

CEAS	: Common European Asylum System
ENP	: European Neighbourhood Policy
EU	: European Union
EUNAFOR MED	: European Union Naval Force Mediterranean
Eurostat	: European Union's Statistical
HAM	: Hak Asasi Manusia
IOM	: International Organization for Migration
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
OHCHR	: Office of the United Nations High Commissioner
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PEGIDA	: Patriotic Europeans Against the Islamization of the Occident
UNHCR	: United Nations High Commissioner for Refugees

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2011, Uni Eropa mengalami fenomena masuknya gelombang imigran secara besar-besaran akibat *Arab Spring*. Para imigran yang bergerak menuju Eropa, akibat menghindari kekejaman rezim Syiah. Menurut Zuhari, Perlakuan orang Eropa dan Amerika terhadap para imigran memang lebih baik dan menarik, maka daripada itu Eropa lebih menarik dibanding Timur Tengah (Samosir, Mengapa Imigran ke Eropa, Bukan ke Timur Tengah, 2015). Sebuah lembaga *think-tank*, Brookings Institution yang berbasis di Washington, mengatakan hampir dua juta orang telah meninggalkan rumah mereka akibat dampak dari gejolak Arab Spring di Afrika Utara dan Timur Tengah, di antaranya Arab Spring telah menumbangkan para penguasa di Tunisia, Mesir, Libya, Yaman dan pemberontakan sipil di Bahrain, Suriah, Aljazair, Irak, Yordania, Kuwait, Maroko, dan Oman (Patnistik E. , 2012). Adanya konflik *Arab Spring* ini memaksa sebagian besar masyarakat yang berasal dari negara-negara konflik seperti Suriah, Libya, Tunisia, Yaman, Mesir, dan Bahrain untuk bermigrasi ke Uni Eropa demi menyelamatkan diri mereka dari konflik tersebut (Nafidah, 2018).

Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, Uni Eropa kedatangan pengungsi dalam jumlah yang sangat besar (UNHCR, 2015). Euro-stat, yakni badan statistik Uni Eropa, menyatakan permohonan suaka dari Tunisia saja naik hampir 12 kali lipat dari hanya 540 pada 2010 menjadi 6.330 pada 2011 (Patnistik E. ,

2012). Selanjutnya, UNHCR juga melaporkan sedikitnya 366 ribu imigran telah menyebrangi laut mediterania ke Eropa, lalu mayoritas menuju Jerman. Jerman menampung 18 Pengungsi dan Jerman diprediksi bakal menerima 800 ribu aplikasi permintaan suaka dari pada pengungsi (Samosir, Mengapa Imigran ke Eropa, Bukan ke Timur Tengah, 2015). Lalu, 200 ribu di antaranya masuk melalui Pulau Kos kawasan lain di Yunani, dan sekitar 100 ribu melalui Pulau Lampedusa, Sisanya sekitar dua ribu orang melali selat Gibraltar menuju Spaonyol (REPUBLIKA, 2015). Bahkan pada tahun 2015 merupakan puncak dari datangnya imigran dari negara-negara konflik *Arab Spring* ke Uni Eropa, lebih dari satu juta imigran yang didominasi oleh pengungsi datang ke Eropa untuk mencari perlindungan dan kehidupan yang layak, Angka tersebut sangat jauh jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 280.000 imigran (BBC, 2016).

Pada awalnya, Uni Eropa tidak mempermasalahkan kedatangan para imigran ini karena berkaitan dengan kemanusiaan. Namun, memasuki tahun 2015, para elit negara di Uni Eropa mulai melihat fenomena ini sebagai suatu ancaman terhadap eksistensi dan mengikis identitas bangsa Eropa (Pertiwi L. A., 2016, p. 223). Karena di sisi lain dari banyaknya imigran yang datang, tidak sedikit juga yang datang merupakan pedagang dari Afrika Utara (Worley, Six out of 10 migrants to Europe come for 'economic reasons' and are not refugees, EU Vice President Frans Timmermans says, 2016). Di sisi lain, ketimpangan pembukaan kuota terjadi dan sistem relokasi tidak jelas. Seperti Jerman yang membuka kuota untuk imigran pada tahun 2015 sebanyak 476.000 sementara UK hanya menerima 20.000. Dan negara anggota EU hanya bersepakat merelokasi 160.000 migran, tetapi hanya

berelaku bagi mereka yang berada di Italia dan Yunani (NN-BBC, 2016). Sementara tidak ada aturan kolektif yang dapat mengatur sistem kuota terbatas.

Kemudian mulai berkembang menjadi suatu kekhawatiran akan ekspansi dari jaringan ekstrimis *Islamic State* di Uni Eropa melalui perekrutan para imigran dari Suriah dan Irak. Kekhawatiran yang muncul menjadi semakin kompleks karena bukan hanya takut terkikisnya identitas bangsa Eropa karena banyaknya imigran yang dapat mengubah komposisi komponen masyarakat di negara-negara Uni Eropa, kekhawatiran yang lainnya muncul karena takut akan aksi para ekstrimis *Islamic State* yang akan melakukan pembunuhan secara massal di Uni Eropa (Europol, 2016). Oleh karena itu pihak Uni Eropa berusaha mengeluarkan strategi berupa kebijakan-kebijakan untuk menangani isu imigran ini.

Uni Eropa banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti pembagian kuota imigran ke masing-masing negara anggota Uni Eropa. Pemberian dana dan bantuan tenaga untuk penampungan serta identifikasi sebagai pengungsi. Hingga kebijakan untuk melakukan deportasi kepada imigran yang tidak memasuki kualifikasi sebagai imigran.

Dalam KTT 29 Juni 2018 lalu, di Brussels, Belgia, Ada delapan artikel yang disepakati, salah satunya memperketat pengawasan Uni Eropa dan membagi imigran yang datang. Yakni mendirikan Pusat Imigran di Uni Eropa, ini merupakan kebijakan yang menjadi diskursus kontroversial, sebab sebagaimana negara Eropa menentang bagi negara-negara Uni Eropa untuk mendirikan pusat ini. Karena imigran akan diselamatkan di wilayah blok Uni Eropa dan diambil serta diproses untuk klaim suaka, mereka yang ditolak akan dikembalikan. Sementara yang

diterima akan ditranfer ke negara Uni Eropa. Hal ini ditentang oleh Hungaria sebagai negara yang paling vokal. Lalu kesepakatan lainnya adalah reformasi kebijakan suaka Uni Eropa, KTT menyerukan bagi negara-negara anggota untuk bekerja sama dan mengambil semua tindakan legislatif dan administratif internal. Namun menjadi beban bagi negara anggota Uni Eropa terhadap kebijakan tersebut karena tidak dapat diprediksi sampai kapan gelombang imigran ini berhenti. Salah satunya Jerman, menginginkan periode tanggung jawab tahunan, persyaratan ini ditolak oleh Italia dan negara-negara depan Mediterania, di mana mereka merasa paling banyak menampung imigran yang menyebrang (Saputra E. Y., 2018).

Akan tetapi kebijakan-kebijakan tersebut dianggap hanya “mengobati”, bukan mencegah. Oleh karena itu Uni Eropa membentuk suatu operasi militer sebagai bentuk upaya mencegah masuknya bisnis penyelundupan pengungsi dan jaringan perdagangan manusia serta menghalau masuknya kelompok ekstrimis *Islamic State* ke Uni Eropa. Operasi militer ini disebut sebagai Operasi Sophia atau secara resmi disebut juga *European Union Naval Force Mediterranean* (EUNAVFOR MED atau ENFM) (Council of the European Union, 2018).

Berdasarkan dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa isu imigran di Uni Eropa ini sangat berpengaruh terhadap dinamika sosial politik negara-negara anggota Uni Eropa. Isu ini juga dapat dikatakan sebagai sebuah tantangan bagi Uni Eropa dalam hal penanganan ancaman bersama dengan tetap menjaga hubungan mengikat antara negara-negara anggota Uni Eropa Isu imigran ini yang semula merupakan sebuah isu kemanusiaan dapat menjadi sebuah isu keamanan.. Dalam hal ini, kebijakan Uni Eropa dalam membentuk Operasi Sophia atau EUNAVFOR MED atau ENFM

MED ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam proses sekuritisasi dalam langkah penganggulangan krisis imigran di Uni Eropa tahun 2015-2018.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana sekuritisasi isu imigran oleh Uni Eropa tahun 2015-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya Uni Eropa dalam mengatasi permasalahan imigran.
2. Untuk mengetahui proses sekuritisasi isu imigran di Uni Eropa dalam Operasi Sophia.

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting karena melihat bahwa isu imigran merupakan suatu isu yang sangat berpengaruh terhadap dinamika sosial politik negara-negara anggota Uni Eropa. Penelitian ini menjadi menarik karena pada awalnya, isu imigran ini hanya merupakan sebuah isu yang berada pada level nasional. Akan tetapi dengan berkembangnya imigran yang masuk ke Uni Eropa dengan jumlah yang cukup besar, menjadikan isu imigran ini disekuritisasi oleh aktor-aktor sekuritisasi yang berupa kepala pemerintahan ataupun pihak dari oposisi di negara-negara anggota Uni Eropa karena dianggap sebagai sebuah ancaman eksistensial bagi bangsa Eropa, yang kemudian saling mendorong anggota-anggota yang lain untuk melakukan sekuritisasi isu imigran tersebut. Pada prosesnya, sekuritisasi isu imigran ini ternyata mendapatkan respon yang baik dari audiens atau masyarakat

Uni Eropa yang sependapat bahwa isu imigran merupakan sebuah ancaman eksistensial yang mampu berkembang hingga mengancam sektor politik dan sektor ekonomi. Sehingga proses sekuritisasi ini mampu berkembang hingga level regional di Uni Eropa. Selain itu, penelitian ini layak diteliti karena sekuritisasi isu imigran yang terjadi di Uni Eropa sudah melibatkan pihak militer sebagai upaya untuk membendung ancaman dari isu imigran yang terjadi pada tahun 2015-2018

1.5 Cakupan Penelitian

Agar pembahasan penelitian ini tetap terfokus, maka peneliti membatasi isu imigran yang akan diteliti sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Karena pada tahun 2015 merupakan tahun dibentuknya Operasi Sophia dan menjadi puncak peningkatan pelamar pengajuan suaka dari imigran yang berlabuh di wilayah Uni Eropa, kira-kira mencapai 1.256.000 (Eurostat, 2016). Sedangkan tahun 2018 merupakan tahun terakhir efektifnya Operasi Sophia, karena setelah tanggal 31 Desember 2018, Operasi Sophia sudah mulai mengurangi intensitasnya dalam mengawasi laut Mediterania dari masuknya imigran gelap yang berasal dari Timur Tengah dan Afrika meskipun Operasi Sophia masih berlangsung hingga sekarang (Council of the European Union, 2018). Pada tahun ini juga terjadi penurunan yakni 580.00 pelamar suaka 11% turun dibandingkan dengan tahun 2017 serta setengah dari tahun 2015 (Eurostat, 2019).

1.6 Kajian Pustaka

Penelitian pertama mengenai sekuritisasi isu imigran di Uni Eropa dapat ditemukan pada penelitian yang diteliti oleh Tiffany Setyo Pratiwi yang berjudul “*Sekuritisasi Penanganan Isu Pengungsi di Swedia: Berhasil atau Gagalkah?*”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan konsep sekuritisasi. Sehingga penelitian tersebut secara garis besar menyinggung sekuritisasi isu pengungsi yang terjadi di Uni Eropa, khususnya di Swedia. Menurut Tiffany, sekuritisasi isu pengungsi berhasil terlaksana di Swedia karena beberapa faktor. Faktor utama keberhasilan dari sekuritisasi isu pengungsi di Swedia ini berasal dari aktor-aktor penting di Swedia yang berhasil mempengaruhi masyarakat Swedia untuk memperhatikan dampak-dampak dari isu pengungsi yang terjadi di Swedia secara lebih serius. Hal ini dikarenakan memiliki dampak sosial dan politik yang cukup kuat terhadap paradigma atau pandangan masyarakat Swedia terhadap pengungsi. Semuanya seakan sepakat bahwa arus masuk pengungsi harus di jaga ketat agar tidak menimbulkan ancaman terhadap identitas dan keamanan nasional Swedia (Pratiwi, 2018).

Selanjutnya penelitian kedua terdapat pada penelitian yang diteliti oleh Ani Kartika Sari yang berjudul “*Upaya Uni Eropa Dalam Menangani Pengungsi Dari Negara-Negara Mediterania Selatan di Kawasan Eropa*”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan konsep Regionalisme. Sehingga penelitian ini berusaha untuk menerangkan upaya dari Uni Eropa dalam menangani krisis pengungsi. Konsep Regionalisme yang memiliki arti kawasan ini dapat diartikan sebagai suatu kumpulan negara yang memiliki kedekatan

berdasarkan geografis. Setelah itu juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan negara yang memiliki kedekatan berdasarkan sociokultural. Yunani merupakan salah satu negara pertama yang menjadi destinasi utama bagi para pengungsi Mediterania Selatan ke Kawasan Eropa. Untuk mengatasi lonjakan gelombang pengungsi tersebut, Yunani berupaya untuk melakukan alokasi sejumlah pengungsi ke beberapa negara Eropa yang lain seperti Jerman (145 pengungsi), Belanda (545) dan Prancis (130 pengungsi). Akan tetapi adanya upaya relokasi pengungsi ke negara Eropa yang lain tidak mampu mengurangi jumlah pengungsi yang berada di Yunani secara signifikan. Hal tersebut dikarenakan adanya lonjakan pengungsi yang berasal dari Suriah dan mencapai puncaknya pada tahun 2013 (S., 2015).

Berdasarkan penelitian ketiga oleh Putri Lestari yang berjudul “*Frontex (European Border Coast and Guard Agency) Securitization Agenda in Greece Illegal Immigrant Crisis*”. Penelitian ini merupakan penelitian tipe deskriptif yang Uni Eropa melakukan langkah-langkah sekuritisasi isu imigran di Yunani dengan mengutamakan peranan dari *Frontex* dalam keamanan perbatasan Yunani. *Frontex* merupakan badan penjaga perbatasan dan pantai di Eropa, sehingga *Frontex* akan memfasilitasi negara-negara anggota Uni Eropa untuk menerjunkan petugas keamanan yang dibutuhkan termasuk juga pengecekan dokumen terhadap imigran yang ilegal, dan lain-lain. Melalui peranan *Frontex* dan beserta operasi-operasi yang dilakukan di perbatasan Yunani dapat mengurangi terjadinya migrasi yang ilegal secara berangsur (Lestari, *Frontex (European Border Coast and Guard Agency) Securitization Agenda in Greece Illegal Immigrant Crisis*, 2018).

Pada penelitian keempat dilakukan oleh Mega Nisfa Makhroja yang berjudul *“Sekuritisasi Isu Migrasi di Polandia Pasca Krisis Pengungsi di Uni Eropa”*. Penelitian ini merupakan penelitian tipe deskriptif yang menggunakan konsep Sekuritisasi. Sehingga pada penelitian ini akan membahas mengenai penanganan krisis oleh Polandia di Uni Eropa. Yang menguatkan sekuritisasi di Polandia adalah karakter masyarakat yang homogen dan pengaruh media dan organisasi lokal sehingga menggiring opini publik tentang migran sebagai ancaman. Sementara itu, organisasi regional menuntut peran Polandia dalam menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan lainnya. Melalui fenomena tersebut dapat diketahui bahwa proses sekuritisasi dapat dilakukan oleh sebuah negara karena adanya perluasan isu yang diamini secara bersama-sama dalam kerangka intersubjektivitas. Dengan demikian, perubahan status isu imigrasi yang awalnya merupakan dukungan dan saat ini dianggap menjadi ancaman dikarenakan proses sekuritisasi yang dilakukan oleh rezim baru di Pemerintah Polandia sejak 2015. Namun demikian, pada Pemilu Presiden Polandia tahun 2020, kemenangan tipis calon incumbent (51,2%) dengan partai Civic Platform bisa jadi mengubah peta politik Polandia ke depannya (BBC, 2020). Beberapa organisasi sosial mulai menyuarakan anti radikalisme di Polandia seperti Never Again Association (Never Again, 2020) and IBS Foundation (Makhroja, 2020).

Pada penelitian keempat dilakukan oleh Novrizal Roynanda yang berjudul *“Kebijakan Uni Eropa Terhadap Krisis Pengungsi: Analisis Sekuritisasi Dalam Pembentukan EU-Turkey Statement”*. Penelitian ini merupakan penelitian tipe deskriptif yang menggunakan konsep Sekuritisasi. Sehingga pada penelitian ini

akan membahas mengenai penanganan krisis oleh Uni Eropa yang akan dilakukan dengan langkah sekuritisasi dan diwujudkan melalui pembentukan *EU-Turkey Statement*. Kebijakan-kebijakan penanganan krisis pengungsi dari Uni Eropa sendiri memiliki kompleksitasnya tersendiri mulai dari pertentangan antar negara-negara anggota Uni Eropa hingga hambatan dalam pelaksanaannya. Pembentukan kebijakan ini juga menuai pro dan kontra, ada yang menganggap bahwa kebijakan ini telah menciderai hak asasi manusia dari para pengungsi dan ada juga yang menganggap bahwa kebijakan ini merupakan langkah yang tepat dalam menjadi solusi atas krisis pengungsi yang terjadi di Uni Eropa (Roynanda, Kebijakan Uni Eropa Terhadap Krisis Pengungsi: Analisis Sekuritisasi Dalam Pembentukan EU-Turkey Statement [SKRIPSI], 2019).

Selanjutnya penelitian kelima dilakukan oleh Wanda Puspasari Suhita berjudul "*Kegagalan Operasi Mediterranean European Union Naval Force Dalam Mengurangi Peningkatan Arus Imigran ke Eropa*". Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan teori efektivitas rezim. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa Uni Eropa membuat sebuah kebijakan dengan membentuk operasi militer agar mampu membendung peningkatan arus imigran ke Eropa. Menurut Wanda operasi militer tersebut gagal karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti peningkatan arus imigran yang memiliki tingkat kerumitan yang tinggi dan *problem solving capacity* yang lemah karena Uni Eropa belum memiliki kapabilitas dan kinerja penjaga pantai. Serta angkatan laut Libya yang dianggap kurang maksimal. Selain itu juga armada militer dianggap kurang cocok untuk menjalankan misi pencarian dan penyelamatan (Suhita W. P., 2018).

Beberapa penelitian yang telah diteliti seperti di atas membahas berbagai bentuk upaya penanggulangan yang berkaitan dengan kebijakan dalam penanganan krisis pengungsi oleh Uni Eropa. Jika penelitian di atas cenderung membahas pada upaya Uni Eropa menangani arus imigran di negara anggota, kebijakan Uni Eropa, sekuritisasi *Frontex*, dan kegagalan Operasi Sophia. Dalam penelitian ini justru akan berbeda dari literatur-literatur yang ada karena penelitian ini akan lebih fokus dalam melihat proses sekuritisasi Operasi Sophia. Dengan menggunakan perspektif sekuritisasi, penelitian ini akan menganalisis langkah-langkah yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam mengkonstruksi masalah keamanan dalam krisis pengungsi di Eropa sehingga Uni Eropa membentuk Operasi Sophia sebagai kebijakan darurat dan melegitimasi tindakan di luar batas.

1.7 Kerangka Pemikiran

Konsep Sekuritisasi Mazhab Kopenhagen berasal dari buku berjudul *Security: A New Framework for Analysis* karya Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde yang terbit pada tahun 1998. Dalam buku tersebut, premis utama dari konsep sekuritisasi adalah sekuritisasi dapat dimainkan dalam sebuah permainan kata pada pidato (*speech act*). *Speech act* merupakan sebuah retorika bahasa yang digunakan oleh aktor sekuritisasi untuk mendeklarasikan suatu isu atau masalah menjadi suatu ancaman keamanan kepada audiens atau masyarakat yang menjadi sasaran untuk dipengaruhi pemikirannya. Aktor sekuritisasi biasanya merupakan seorang pemimpin politik, pemerintah, birokrat atau kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan untuk mengubah suatu isu atau masalah sebagai suatu

ancaman keamanan. Sekali saja suatu isu atau masalah yang dikonstruksi secara sosial sebagai suatu ancaman keamanan, maka tepat atau tidak isu atau masalah tersebut, isu atau masalah tersebut akan dinilai sebagai suatu ancaman keamanan untuk selamanya.

Setelah suatu isu diakui sebagai suatu ancaman keamanan, maka cara apapun dapat digunakan untuk bertahan melawan ancaman keamanan tersebut. Ada beberapa kriteria yang digunakan oleh Mazhab Kopenhagen untuk mendefinisikan proses suatu isu atau masalah dikonstruksikan menjadi suatu ancaman keamanan. Pertama adalah adanya aktor yang mengklaim suatu isu atau masalah sebagai sesuatu hal yang mengancam keamanan. Kedua, aktor tersebut akan berusaha menggunakan cara apapun untuk melawan ancaman keamanan yang sudah diklaimnya. Ketiga, terdapat audiens atau masyarakat yang dapat diajak bicara oleh aktor tersebut. Karena adanya audiens atau masyarakat yang dapat diajak bicara oleh aktor tersebut dapat menunjukkan bahwa klaim isu atau masalah tersebut sebagai suatu hal yang mengancam keamanan dapat dibenarkan ataupun diterima sehingga mampu menjadikan hal tersebut menjadi suatu hal yang bersifat prioritas (Buzan, Wæver, & Wilde, 1998).

Membangkai suatu isu atau masalah menjadi suatu ancaman keamanan berarti sesuatu tersebut akan mendapatkan suatu hak dari otoritas dalam merespons urgensi dengan mengabaikan prosedur, aturan, dan bahkan hukum yang biasa atau hukum yang selama ini digunakan. Karena isu yang mengancam keamanan merupakan keadaan yang darurat seperti yang dikatakan oleh Buzan dkk. bahwa

“By labeling it as security, an agent claims a need for, and a right to treat it by extraordinary means”.

Penting untuk menggarisbawahi bahwa audiens memiliki peran yang penting dalam memainkan konsep sekuritisasi. Sekuritisasi ini merupakan suatu proses dalam mencari kebenaran yang hendak dicapai atau proses intrasubjektif. Dalam hal ini terdapat suatu negosiasi yang terjadi secara terus menerus antara aktor sekuritisasi dengan audiens. Audiens memiliki hak dalam memilih untuk menerima ataupun memilih untuk menolak isu atau masalah yang diajukan oleh aktor sekuritisasi. Audiens akan menerima atau menolak isu atau masalah tersebut sebagai ancaman keamanan dan mereka juga yang melegitimasinya. Pada akhirnya, konsep keamanan tidak akan berada di subjek ataupun objek melainkan berada di antara keduanya (Buzan, Wæver, & Wilde, 1998).

Selanjutnya yang menjadi inti dari diskusi mengenai sekuritisasi ini merupakan sebuah pertanyaan *What is Security?*. Karena memang tidak ada definisi yang dapat disepakati bersama mengenai definisi apa itu keamanan. Buzan dkk. bahkan berani menyatakan bahwa keamanan itu dapat dilihat sebagai suatu konsep yang pada dasarnya memang diperebutkan. Namun, Buzan dkk mencoba menjawab pertanyaan ini sebagai suatu kelangsungan hidup suatu negara atau bangsa dan apakah ada ancaman eksistensial terhadap objek rujukan. Buzan kemudian menulis bahwa *“security is pursuit of freedom from threats”*. Dalam pengertian tersebut, keamanan ini dianggap sebagai suatu kelangsungan hidup dari sesuatu yang mengancam keberadaan kelangsungan hidup tersebut (Buzan B. , *People, States and Fear: An Agenda for Security Analysis in the PostCold War Era*, 1991).

Sehingga kemudian Weaver menyatakan bahwa mendeklarasikan masalah sebagai salah satu keamanan merupakan pilihan politik dan ketika suatu isu atau masalah dijadikan sebagai ancaman keamanan, maka hal tersebut merupakan sekuritisasi, baik didasarkan pada ancaman nyata atau hanya dirasakan saja. Keamanan dalam definisi ini dibangun secara sosial dan merujuk pada dirinya sendiri. Jika seorang aktor penting yang menyatakan suatu isu atau masalah sebagai ancaman keamanan, maka audiens cenderung melegitimasi tindakan-tindakan luar biasa dalam menghadapi ancaman yang dibangun secara sosial tersebut meskipun terkadang berlebihan. Akan tetapi audiens tidak serta-merta melegitimasi tindakan tersebut. Karena suatu ancaman keamanan tidak bisa begitu saja dibebankan pada audiens. Misalnya pada ancaman keamanan dalam hal identitas budaya, Wæver menulis bahwa masalah keamanan akan terjadi jika terdapat ancaman terhadap *“traditional patterns of language, culture, association, and religious and national identity and custom”*. Akan tetapi Wæver juga mengakui bahwa sulit untuk memberikan definisi objektif ketika terdapat ancaman (Wæver, *Societal Security: The Concept*, 1993).

Berdasarkan pada penjelasan dari konsep Sekuritisasi Mahzab Kopenhagen oleh Buzan dkk. tersebut, maka penulis akan menganalisis bahwa Uni Eropa telah melakukan suatu proses sekuritisasi dalam pembentukan kebijakan untuk membentuk EUNAVFOR MED atau Operasi Sophia. Uni Eropa beserta negara-negara anggotanya yang berfungsi sebagai aktor sekuritisasi telah mengubah isu atau masalah krisis pengungsi yang semula merupakan isu atau masalah kemanusiaan menjadi suatu isu atau masalah yang mengancam keamanan. Penyajian ancaman tersebut meliputi ancaman terorisme dan runtuhnya identitas

bangsa Eropa yang mana di sini masyarakat Uni Eropa berfungsi sebagai audiens atau objek rujukan. Dalam hal ini, Uni Eropa memiliki kemampuan atau hak untuk menangani isu atau masalah krisis pengungsi di luar batas normal dengan membentuk EUNAVFOR MED atau Operasi Sophia sebagai suatu tindakan yang bersifat prioritas dan darurat.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena penelitian deskriptif berguna untuk mengungkapkan suatu bentuk kebenaran yang bersifat objektif dan berdasarkan dengan bukti ilmiah yang kuat. Jenis penelitian deskriptif ini dapat mendeskripsikan fenomena-fenomena dan mampu memberikan suatu pandangan teoritis mengenai kondisi dan perkembangan yang terjadi (Ikbar, Metodologi dan Teori Hubungan Internasional, 2014).

Penelitian ini juga dapat menjadi penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif digunakan untuk mengindikasikan keadaan secara menyeluruh melalui pengumpulan data yang selaras terhadap topik yang diteliti dan tanpa melalui prosedur yang statistik. Penelitian kualitatif ini mampu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis ataupun terucap yang dapat diamati berdasarkan fakta-fakta yang terlihat dan apa adanya (Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 2007).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek primer penelitian akan tertuju kepada Uni Eropa sebagai pembuat kebijakan dan juga negara-negara anggota dari Uni Eropa sebagai subjek sekunder. Sedangkan objek primer penelitian ini akan terfokus kepada kebijakan EUNAVFOR MED atau Operasi Sophia dan juga akan meneliti objek sekunder lain yang berkaitan dengan penelitian ini seperti kebijakan-kebijakan terdahulu yang telah dibuat oleh Uni Eropa.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan metode pengumpulan data sekunder sebagai sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian. Metode pengumpulan data sekunder yang dimaksud adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen seperti jurnal, buku, dokumen, surat kabar atau situs-situs internet lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti hingga data yang dikeluarkan oleh peneliti terdahulu ataupun badan penelitian yang melakukan penelitian berkaitan dengan isu dalam rumusan masalah.

1.8.4 Proses Penelitian

Setelah melakukan pengumpulan data yang berasal dari data sekunder, data-data yang sudah terkumpul akan dibaca secara menyeluruh dan dianalisis untuk dipahami. Selanjutnya adalah melakukan pembagian subtopik terhadap data-data yang sudah terkumpul untuk menentukan kategori dan tema yang terkait dengan penelitian sehingga dapat dilakukan

pengembangan narasi atau deskripsi sesuai dengan subtopik yang akan diteliti dan menuliskan temuan-temuan yang dihasilkan dari bahan bacaan tersebut secara deskriptif.



BAB II

DINAMIKA ISU IMIGRAN DI UNI EROPA

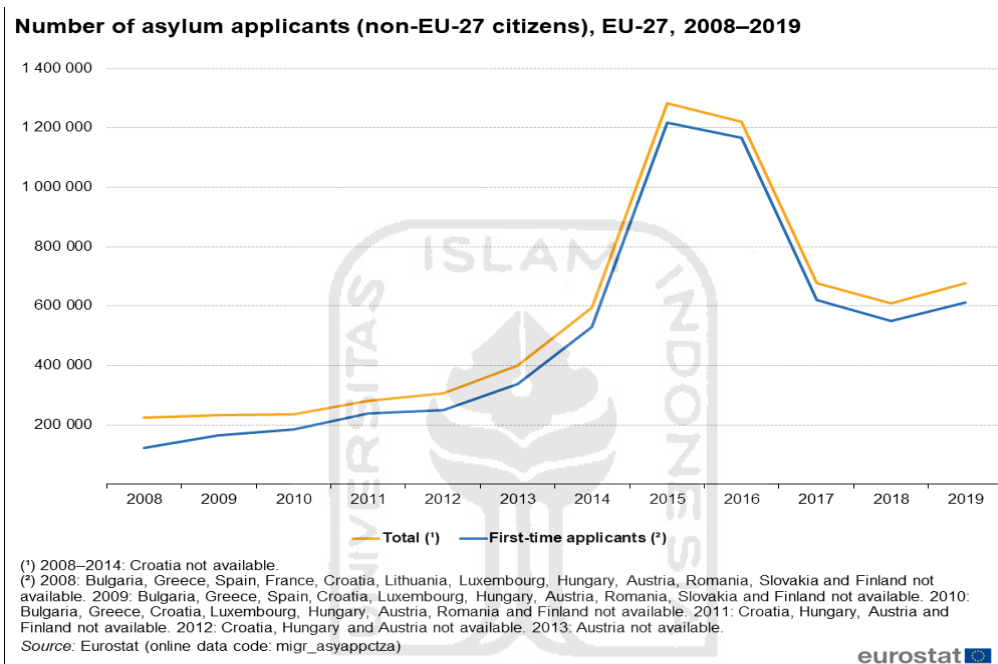
Ketika terjadinya proses sekuritisasi, keamanan ini merupakan praktik *Self-Referential* yakni tidak objektif, tergantung pada persepsi, interpretasi dan reaksi *target audience* terhadap *existential threat* tertentu. *Existential threat* dalam poin ini adalah Operasi Sophia. Praktik tersebut yang dijadikan suatu masalah sebagai isu keamanan. Proses terjadinya perubahan masalah menjadi sebuah isu kewanaman bukan karena adanya ancaman nyata, akan tetapi dari adanya penegasan masalah yang kemudian dinyatakan sebagai suatu ancaman (Buzan, Wæver, & Wilde, 1998).

Penegasan masalah yang kemudian dijadikan sebagai suatu ancaman kewanaman dapat kita lihat dari data yang dijabarkan secara deskriptif mengenai arus imigrasi ke Eropa. Keseriusan ini tertuang di dalam kebijakan yang dilakukan oleh Uni Eropa dan negara anggota dalam menyikapi arus imigrasi ini. Berbagai macam yang dilakukan dalam menanggapi hal ini, dimulai dengan Schengen Agreement, Dublin Convention, dan Common European Asylum System (CEAS) dan berbagai macam Operasi Mare Nostrum, Operasi Triton, Operasi Poseidon dan Operasi Sophia untuk menangani isu imigran di Kawasan Eropa.

2.1 Arus Imigrasi ke Eropa

Sejak tahun 2015 meningkatnya jumlah pengungsi di Uni Eropa begitu melonjak, dibuktikan dengan perbandingan tahun. Antara tahun 2015, dari bulan

Januari-Agustus imigran yang datang sedikitnya 350.000, sedangkan tahun 2014 jumlah imigran sepanjang tahun kurang lebih 380.000 (Sari A. P., 2015). Pew Research Center melaporkan jika imigran yang datang dan mencari suaka ke Uni Eropa sebanyak 1,3 juta orang (Center, 2016).sebanyak 1,3 juta orang (Center, 2016).



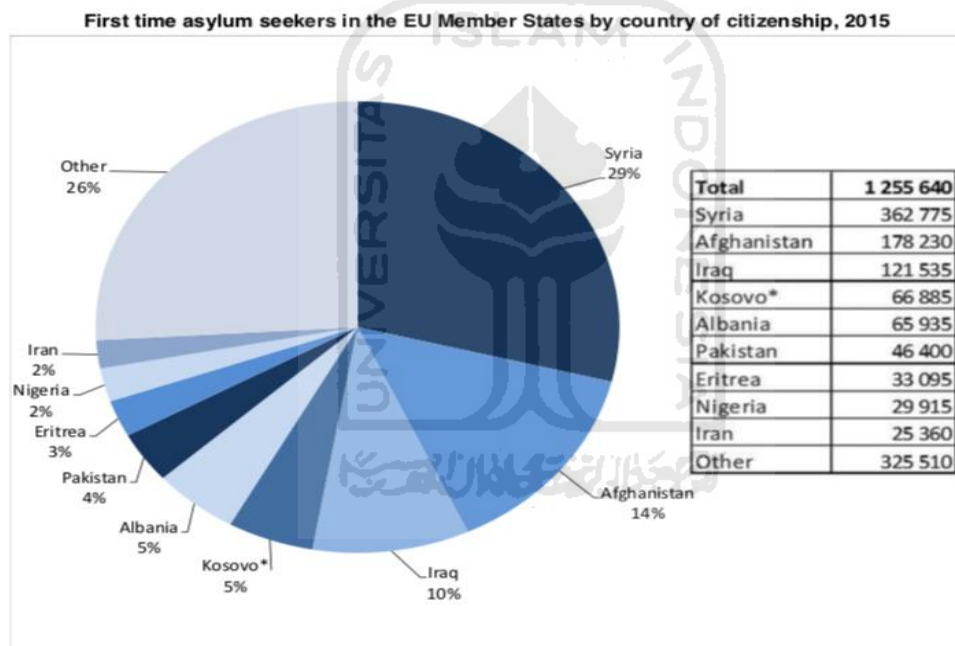
Gambar 1. Angka Pengajuan Aplikasi Suaka

Sumber : Eurostat (Online data code: migr_asyappctza) (Eurostat, 2020)

Dari data Eurostat (*European Union's statistical agency*), jika tahun 2015 merupakan puncak gelombang imigran yang mencari suaka di Wilayah Eropa mencapai 1.282.690. Tahun 2016, angka imigran masih mendatar di titik 1.221.185. Sementara tahun 2017, Angka imigran begitu menurun drastis 44,5% dibandingkan 2016 yakni mencapai 677.470 pencari suaka di wilayah Uni Eropa. Adapun tahun 2018 angka juga semakin menurun, namun tidak begitu signifikan yakni 608.355. Akan tetapi, di tahun 2019 angka mulai naik secara perlahan yaitu 676.250. Pada tahun 2019, pencari suaka mengajukan permohonan perlindungan

di 27 Negara anggota Uni Eropa, naik 11,2% dibandingkan dengan 2018. Ini adalah pertama kalinya jumlah suaka meningkat dari tahun ke tahun sejak 2015 (Eurostat, 2020).

Jika melihat data tersebut dibandingkan dengan tahun 2014, titik jumlah imigran dari tahun 2015-2018 belum berada di bawah tahun 2014 yang mencapai 594.180 jumlah imigran pencari suaka. Jumlah kewarganegaraan terbesar bersumber dari negara Suriah, Afganistan dan Venezuela. Sejak tahun 2013, Suriah tetap menjadi negara utama yang mencari suaka kewarganegaraan di Eropa.

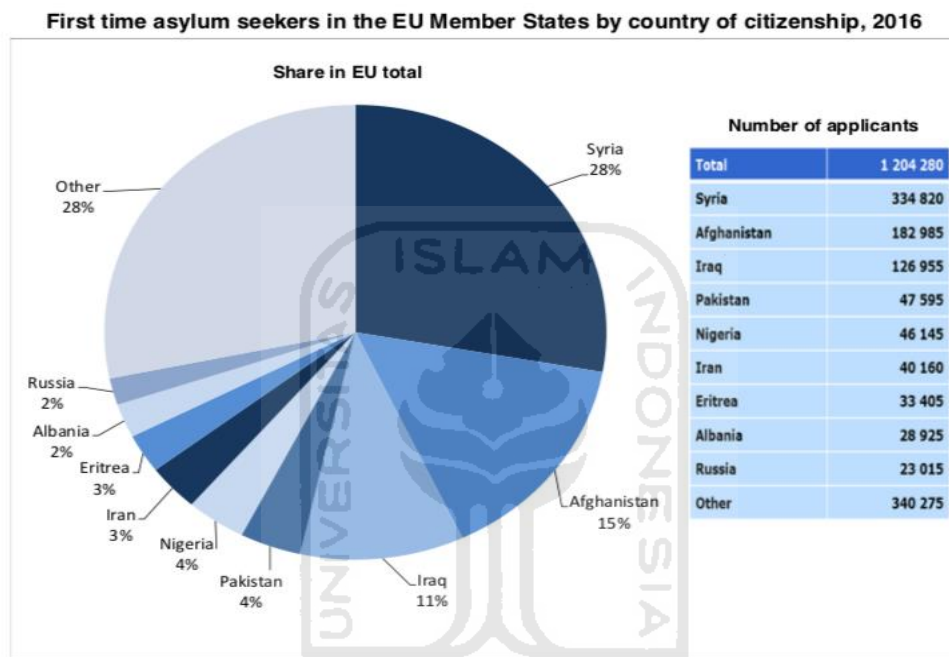


Gambar 2. Pencari Suaka Berdasarkan Kewarganegaraan 2015

Sumber : Eurostat (Online data code: migr_asyappctza) (Eurostat , 2016)

Pada 2015, 1.255.640 pencari suaka pertama kali mengajukan perlindungan internasional di Negara-negara Anggota Uni Eropa (UE), jumlah ini lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Jumlah warga suriah yang mencari perlindungan internasional meningkat dua kali lipat pada 2015 dibandingkan dengan tahun 2014

yaitu mencapai 362.775. Sementara jumlah imigran Afganistan hampir empat kali lipat menjadi 178.230 dan jumlah orang Iraq hingga 121.535. Hampir 1 dari 3 pencari suaka pada tahun ini berdasarkan dari kewarganegaraan Suriah (29% dari jumlah total pelamar kewarganegaraan Suriah) dan hampir setengahnya mengajukan ke Negara Jerman sejumlah (158.700) (Eurostat , 2016).



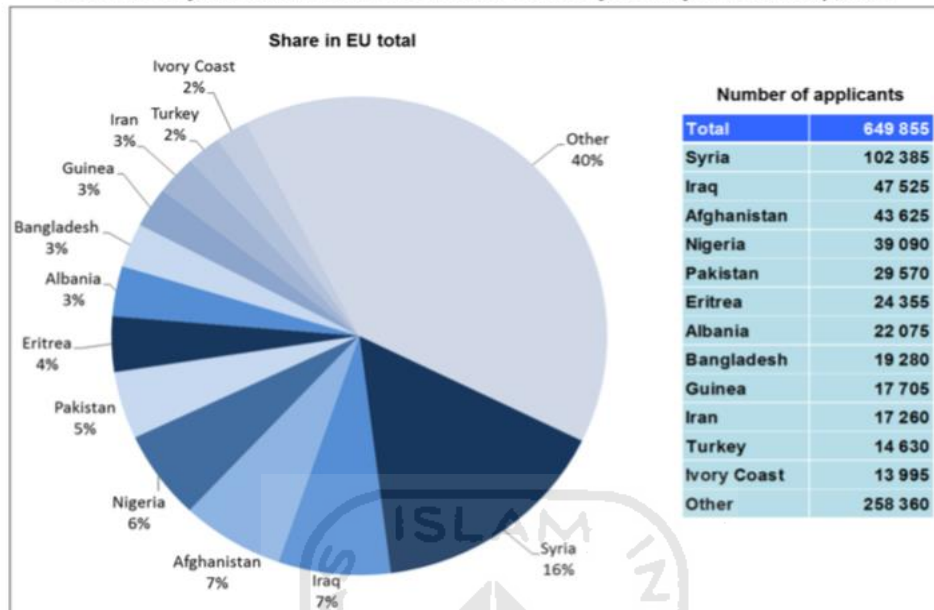
Gambar 3. Pencari Suaka Berdasarkan Kewarganegaraan 2016

Sumber : Eurostat (Online data code: migr_asyappctza) (Eurostat, 2017)

Pada 2016, 1.204.280 pencari suaka pertama kali mengajukan permohonan perlindungan internasional di Negara Anggota Uni Eropa (UE), jumlah ini hanya sedikit turunnya dibandingkan dengan 2015, tetapi hampir dua kali lipat dari 2014 (562.700). Jumlah warga Suriah yang mengajukan suaka tetap terbanyak (334.820), Afganistan (182.985) dan Irak (126.955) dari ketiga negara ini turun sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Suriah tetap menjadi pencari suaka mayoritas yang sebesar 28% dari jumlah pelamar. Jerman masih menjadi negara dengan

pemohon suaka terbanyak sekitar (8.7989 pelamar) dan terendah Slovakia (18

First-time asylum seekers in the EU Member States by country of citizenship, 2017

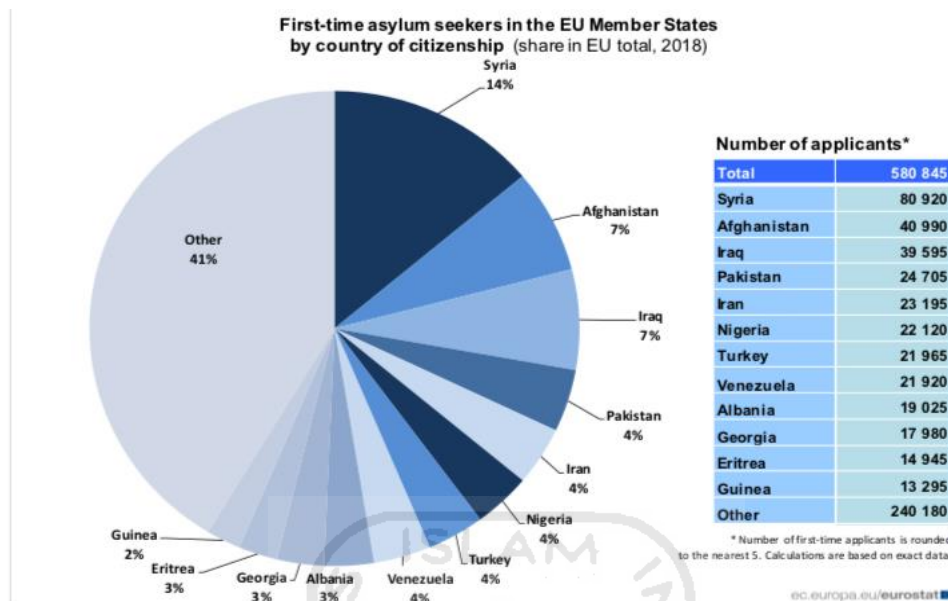


pelamar) (Eurostat, 2017).

Gambar 4. Pencari Suaka Berdasarkan Kewarganegaraan 2017

Sumber : Eurostat (Online data code: migr_asyappctza) (Eurostat, 2018)

Pada 2017, 649.855 pencari suaka pertama kali mengajukan perlindungan internasional di Negara Anggota Uni Eropa (UE). Jumlah pelamar pada tahun ini turun setengah dibandingkan tahun 2017. Suriah tetap sebagai negara yang terbanyak menyumbang sekitar (102.385 pelamar), Irak (47.525) dan Afganistan (43.625) ketiga negara ini selama kurang lebih tiga tahun tetap menjadi negara utama yang mengajukan suaka. Pada tahun ini Suriah turun menjadi 16% dari total pelamar, dan Irak 7% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan hampir 50% mengajukan ke negara Jerman sekitar (21.900). Afganistan negara utama ketiga yang menyumbang 50% pelamarnya ke negara Jerman sekitar (16.400). Jerman masih memuncaki negara tempat berlabuh para imigran dalam mencari suka yang terdaftar aplikasi ini skitar 31% atau 198.300 (Eurostat, 2018).



Gambar 5. Pencari Suaka Berdasarkan Kewarganegaraan Tahun 2018
Sumber : Eurostat (Online data code: migr_asyappctza) (Eurostat , 2019)

Pada tahun 2018, 580.845 pencari suaka pertama kali mengajukan permohonan perlindungan di Negara-negara Uni Eropa (UE), turun sebesar 11% dibandingkan dengan 2017 (649.855 pelamar) dan kurang dari setengah jumlah yang tercatat pada tahun puncak 2015. Negara utama dalam melakukan pengajuan suaka tetap diketiga negara yang sama dalam empat tahun terakhir. Yakni Suriah (80.920 pelamar), Afganistan (40.990) dan Irak (39.595). dibandingkan pada tahun 2017, terjadi penurunan pada negara berkewarganegaraan Suriah (14% dari total pelamar) dan Afganistan (25% dari total pelamar) serta penurunan yang tidak terlalu signifikan pada negara Irak (7% dari total pelamar). Berbedanya pada tahun ini, Jerman tidak pada posisi tertinggi yang menyumbang imigran pencari suaka ke negaranya. Namun Siprus menjadi pelamar tertinggi yakni (8.805 pemohon) dan terendah Latvia (91 pemohon) (Eurostat, 2018).

Adapun negara tujuan utama dari imigran ini adalah rata-ratanya Jerman, Prancis dan Spanyol. Dengan 142.400 pelamar yang terdaftar pada tahun 2019, Jerman menyumbang 23,3% dari semua pelamar di Eropa. Diikuti oleh Prancis 19,6%, Spanyol 18,8%, Yunani 12,2% dan Italia 5,7%. Dan untuk pertama kalinya di tahun 2019 ini, negara-negara anggota menigput permohonan pencari suaka yang rata-rata di atas 5.000 orang. Seperti, Siprus (+66,8% atau 5.100 lebih), Swedia (+27,9% atau 5.000 lebih), Belgia (+27,4% atau 5.000 lebih), Yunani (+15,3% atau 9.900 lebih), Belanda (+9,9% atau 2.000 lebih) dan Yunani (15,3+ atau 8.500 lebih). Sebaliknya juga ada negara anggota Uni Eropa yang mengalami penurunan relatif, seperti Italia (-34,5% atau 18.400 lebih sedikit), Jerman (-12.0% atau 19.400 lebih sedikit) dan Austria (-7.0% atau 800 lebih sedikit) (Eurostat, 2020).

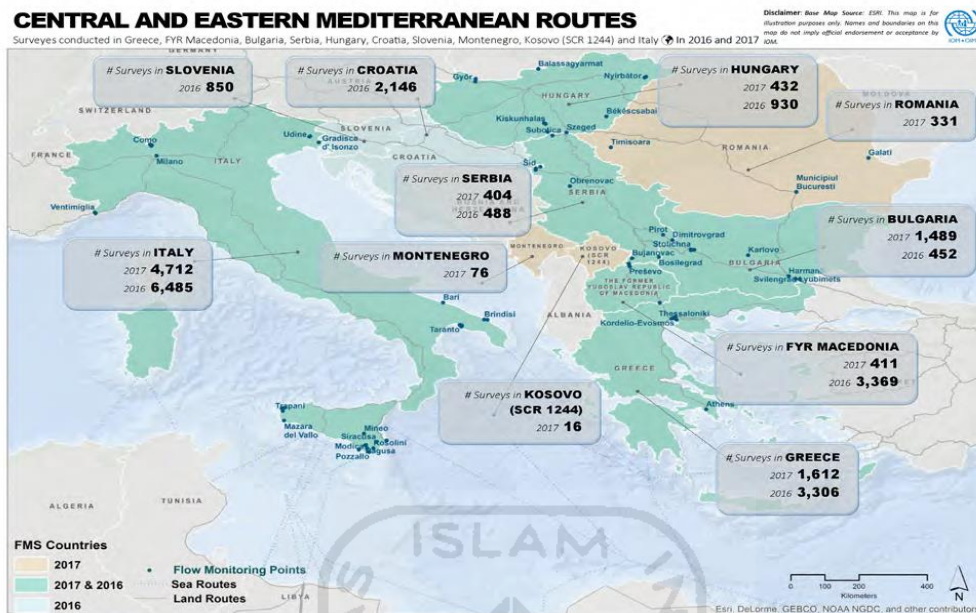
Lalu, Suriah merupakan yang terbesar jumlah pelamar di tujuh Negara dari 27 Anggota Uni Eropa, termasuk 39.000 pelamar di Jerman. Venezuela menyumbang 40.300 pelamar yang tertinggi dari satu negara anggota Uni Eropa pada tahun 2019. Dan 28.900 orang Kolombia yang mengajukan permohonan di Spanyol, sementara orang Afganistan menyumbang 23.700 pelamar di Yunani. Jumlah pelamar tinggi berikutnya dari kewarganegaraan tunggal pada tahun 2019 juga diamati di Jerman (13.700 pelamar dari Iran dan 10.800 dari Turki), Yunani (10.800 pelamar dari Suriah) dan Prancis (10.000 pelamar dari Afganistan) (Eurostat, 2020).

Minat imigran pencari suaka di tanah Eropa ini terbilang ingin mendapatkan kehidupan yang layak. Mengingat Eropa merupakan salah satu benua dengan

tingkat Gross Domestic Product (GDP) yang begitu tinggi pada tahun 2015, yaitu sebesar USD 16,417 triliun (Bank, 2018). Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab dari langkah para imigran pergi ke Eropa. Dapat dilihat pada tahun 2016, mayoritas negara berkembang yang mendominasi imigran ini seperti dari wilayah Tanduk Afrika yakni Nigeria, Eritrea, Gambia, Guinea, Senegal, Bangladesh, Sudan, Mali, Cote d'ivoire dan lainnya serta dari Timur Tengah seperti Suriah, Afganistan dan Iraq yang notaben semuanya negara berkembang (Bartoni, 2017).

Sementara instabilitas politik di negaranya menjadi penanda penting mereka bergerak ke Eropa. Menurut Zuhairi pengamat Timur Tengah dari The Middle East Institute, alasan utama kekeringan ini adalah konflik geopolitik yang terjadi di negara-negara teluk (Sari A. P., 2015). UNHCR melaporkan pada tahun 2016, imigran di Eropa ini didominasi oleh mereka yang dari Timur Tengah seperti Suriah (50,2%), Afganistan (20,2%) dan Iraq (7,1%) (UNHCR, 2016). International Organization for Migration (IOM), melalui surveinya pada tahun 2017, di antara imigran ini sekitar 21% melaporkan jika mereka pergi karena perang atau konflik sebagai alasannya beranjak dari negaranya (IOM, 2017). Sedangkan imigran yang melewati rute mediterania 58% imigran melaporkan karena konflik atau perang, 48% karena ekonomi dan 18% karena akses yang terbatas (Bartoni, 2017).

Gambar 6. Peta Persebaran Imigran dan Rute Mediterania



Sumber : International Organization for Migration (IOM, 2017)

Lalu, kedekatan geografis menjadi alasan penting dari bergeraknya para imigran ke Eropa. Seperti yang dapat dilihat dari peta pergerakan imigran di atas, jika rute mediterania sangat sentral dalam masuknya imigran ke Eropa. Laut mediterania memiliki luas sebesar 969.100 mil², berdekatan dengan Benua Eropa bagian Eropa, Asia bagian Timur dan Afrika bagian Selatan. Pulau Lampedusa Italia paling terdekat dengan Tunisia dan Libya yang berjarak 73 mil dan 159 mil dari Libya. Maka dari pada itu, Italia menjadi negara yang didarati oleh imigran lewat rute ini terbanyak dari tahun ke tahunnya dibanding dengan negara anggota Uni Eropa lainnya. Di tahun 2016 ada sekitar 6.485 dan tahun 2017 ada 4.712. Rute mediterania ini populer di tengah kondisi “Arab Spring”, hal ini pula yang dimanfaatkan oleh para imigran.

2.2 Kebijakan Terkait Imigran di Uni Eropa

Berbagai macam yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam mengimplementasikan kebijakan terutama melindungi dan menerima permintaan suaka dari imigran. Dapat dilihat dari kebijakan Uni Eropa dalam menangani para imigran, seperti Schengen Agreement, Dublin Convention, dan Common European Asylum System (CEAS) dan berbagai macam Operasi Mare Nostrum, Operasi Triton, Operasi Poseidon dan Operasi Sophia.

Tepat pada tahun 1985, Schengen Agreement di mulai dalam menghapus cek untuk seseorang yang dapat secara bebas melakukan perjalanan dan menetap di negara Uni Eropa, tahun 1990 perjanjian ini di sepakati (Commission, Schengen Area., 2013). Di antaranya juga memberikan tanggung jawab kepada imigran untuk meninjau aplikasi suaka dan legalisasi status imigran kepada satu negara anggota (Borragen, 2016, pp. 283-284). Tahun 1997, kebijakan ini berhenti dan Dublin Convention atau Dublin Regulation menjadi pengganti dari kebijakan sebelumnya yang merupakan kerangka besar yang bersamaan dalam Schengen Agreement dan menjadi prosedur umum kebijakan imigran di Uni Eropa (Monar, 2001, p. 751).

Sementara pada tahun 1999, Common European Asylum System (CEAS) terbentuk dan dijadikan kebijakan yang mewadahi permasalahan dan pengaturan regulas mengenai imigran dan diimplementasikan oleh seluruh negara anggota Uni Eropa secara bertahap. Ada dua fase utama dalam pengimplemtasiaan kebijakan CEAS ini, pertama pada tahun 2000-2005 dan 2011-2013. Tahun pertamanya, meliputi berbagai regulasi seperti Eurodac Regulation, Temporary Protection Directive, Reception Conditions Directive, Qualification Directive, Asylum

Procedurs Directive dan Dublin Regulation juga masuk di dalam kebijakan ini (Parliament, 1999). Tahun keduanya, CEAS diselesaikan dengan berbagai revisi, namun tekanan arus imigran ini tidak mampu menjadikan kebijakan CEAS berjalan secara optimal (Commission, 2016, pp. 16-17).

Selanjutnya ada European Neighbourhood Policy (ENP), kebijakan ini dikeluarkan oleh Uni Eropa untuk membantu negara-negara tetangga Uni Eropa dalam mencapai kemakmuran. ENP digunakan untuk menunjukkan dukungan Negara Eropa bagi Negara kawasan Mediterania Selatan dalam mengambil jalan transisi dan reformasi. ENP juga memperkuat kerjasama di bidang politik dan ekonomi dan langsung memberikan dana kepada negara-negara tetangganya dalam memperbaiki kondisi negaranya (S., 2015).

Operasi Mare Nostrum ini dibentuk pada 18 Oktober 2013, dibentuk dalam upaya mengatasi gelombang imigran yang menuju Italia, khususnya pada Pulau terdekat di Laut Mediteranean yakni Pulau Lampedusa (Panebianco, 2016). Setelah itu, pada November 2014 dibentuk Operasi Triton yang dibentuk oleh Frontex bekerjasama dengan Pemerintah Italia. Operasi ini merupakan kelanjutan dari Operasi Mare Nostrum yang memiliki tugas mengontrol arus imigrasi yang tidak teratur menuju wilayah Uni Eropa (European Council of the European Union, 2020). Lalu pada 1 Mei 2014, ada Operasi Poseidon yang juga dibentuk oleh Frontex bekerjasama dengan Pemerintah Yunani. Berfokus pada teritorial rute mediterania timur, pastinya tetap mengontrol arus imigran yang ke wilayah Uni Eropa dalam mengancam kejahatan lintas batas (European Council of the European Union, 2020).

Sementara Mediteranean European Union Naval Force (MED EUNAVFOR) atau Operasi Sophia dibentuk pada 2015, dilakukan oleh Uni Eropa bekerjasama dengan Pemerintah Libya dalam menangani isu migrasi terutama mengidentifikasi, menangkap, dan mengancurkan kapal dari upaya penyeludupan atau perdagangan manusia (Battu, 2019). Operasi ini merupakan kelanjutan dari Operasi Mare Nostrum yang sebelumnya dibentuk oleh Pemerintah Italia.

Berbagai hal yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam menanggapi pergerakan arus migran dari tahun ke tahunnya. Yang mana puncak pergerakan ini mula-mula pada tahun 2014 mencapai 1,282.690 juta imigran dan menurun secara perlahan diangka 608.355 ribu pada tahun 2018. Adapun dominasi negara penyumbang imigran ini yaitu Suriah, Afganistan dan Iraq. Dengan itu, Uni Eropa melakukan berbagai macam pula, di mulai dengan adanya perjanjian Schengen, Dublin Convention, Common European Asylum System (CEAS), Operasi Mare Nostrum, Operasi Triton, Operasi Poseidon sampai kepada Operasi Sophia. Operasi Sophia ini merupakan bentuk kerjasama Uni Eropa dengan Pemerintah Libya dalam menangani isu migrasi terutama mengidentifikasi, menangkap dan mengancurkan kapal dari upaya penyeludupan atau perdagangan manusia.

BAB III

SEKURITISASI ISU IMIGRAN OLEH UNI EROPA

Mazhab Kopenhagen mendefinisikan proses suatu isu atau masalah dikonstruksikan menjadi suatu ancaman keamanan. Pertama, adanya aktor yang mengklaim suatu isu atau masalah sebagai sesuatu hal yang mengancam keamanan. Kedua, aktor tersebut akan berusaha menggunakan cara apapun untuk melawan ancaman keamanan yang sudah diklaimnya. Ketiga, terhadap audiens atau masyarakat yang dapat diajak bicara oleh aktor tersebut (Buzan, Wæver, & Wilde, 1998).

Dalam mengklaim sebuah isu politis akan menjadi isu yang disekuritisasi modal yang dimiliki adalah *Securitizing Actor*, yakni pemerintah, partai/kelompok oposisi atau masyarakat. Untuk melihat sebuah isu ini yang dikonstruksi sebagai ancaman eksistensial dapat ditempuh melalui *Speech Act*. *Speech Act* adalah pernyataan (bisa berupa pidato, publikasi, demonstrasi, dan lain-lain) secara verbal menjadi bagian untuk menjustifikasi bahwa sebuah isu tersebut sebagai ancaman bagi negara dan masyarakatnya (Buzan, Wæver, & Wilde, 1998).

3.1 Konstruksi Isu Imigran sebagai Ancaman Eksistensial

Mula-mula imigran ini dilihat sebagai manusia biasa dan bukan sebagai ancaman. Imigran kemudian dilihat sebagai ancaman dengan menyakinkan publik bahwa mereka merupakan ancaman eksistensial (*existential threat*) bagi Uni Eropa. *Existential threat* atau ancaman eksistensial ini adalah ancaman yang diawacanakan

oleh aktor dalam memandang suatu isi yang dilakukan melalui retorika bahasa atau yang disebut dengan *speech act* (Buzan, 1998, hal. 24). Buzan dkk. mengatakan bahwa *speech act* memiliki dua kondisi utama, pertama, aktor harus memiliki posisi strategis dan otoritas khusus dalam melakukan *speech act*. Kedua, penunjukkan objek yang dianggap sebagai ancaman (Buzan, 1998, hal. 33). Sementara yang melakukan *speech act* ini adalah *securitizing actor* yakni pemerintah, partai/kelompok oposisi atau masyarakat. Mereka yang memiliki posisi strategis dan otoritas khusus dan aktornya tidak selalu tunggal, bisa banyak sesuai dengan syarat aktor sekuritisasi ini. Dalam hal ini *securitizing actor* yang dimaksud adalah elit Uni Eropa dan beberapa elit politis negara anggota Uni Eropa. Banyak hal yang diucapkan oleh elit Uni Eropa dan beberapa elit politisi di negara anggota dalam merekonstruksi imigran ini sebagai ancaman eksistensial. seperti halnya yang terjadi pada kasus penembakan *Charlie Hebdo* di Prancis pada waktu silam. Serangan yang terjadi pada 7-9 Januari 2015, yang dimotori oleh dua orang pria bersenjata dengan senapan Kalashnikov Ak-47 menyerang kantor media mingguan, *Charlie Hebdo*. penyerangan itu berdasarkan adanya karikatur satir Islam dan agama lainnya di dalam kantor redaksi tersebut, dan memakan dua belas orang yang tewas dalam aksi itu (Medistiara, 2015).

Victor Orban selaku Perdana Menteri Hongaria dengan tegas merespons isu tersebut dan jelas merekonstruksi identitas imigran sebagai teroris dengan kalimat “*all the terrorist are basically imigrants*” (Kaminski, 2015). Pernyataan orban, berupaya mengeneralisasi pelaku teroris sepenuhnya berasal dari para imigran.

Pernyataan lebih lanjut lainnya dari Orban dengan lebih tegas pula menyampaikan bahwa,

All of them presedent a security threat because we don't know who they are. If you allow thousands or millions of unidentified persons into your house, the risk of terrorism will significantly increase. We would like to save Schengen, we would like to save the liberties including the free movement inside the European Union... Number one job after Paris is to defend the borders and to control who is coming in” (Kaminski, 2015).

Orban dengan lantang mengatakan jika seluruh imigran Muslim memberikan ‘ancaman kemanan’ atas dasar identitas yang tidak dapat diketahui, dan Orban mengatakan ancaman terorisme akan meningkat secara signifikan jika para imigran Muslim dibiarkan masuk ke wilayah Eropa.

Pernyataan selanjutnya juga disusul oleh Geert Wilders selaku anggota Parlemen Belanda, yang mengatakan bahwa “*immigration form Islamic countries*”, Wilders secara tegas juga mengatakan pelaku penembakan Charlie Hebdo dilakukan oleh imigran yang berasal dari negara Islam. Wilders juga memaparkan bahwa seluruh negara anggota dan Uni Eropa segera menutup dan mengontrol perbatasan, memperkenalkan penahanan administratif dan menghentikan imigrasi dari negara-negara Islam (McDonald-Gibson, 2015).

Dalam kasus ini juga, anggota Parlemen Eropa Le Pen dengan diplomatis, tegas dan keras juga mengatakan, “*Fears and warnings of the possible presence of jihadists among the migrants entering our country*” (Pen, 2015). Pada kalimat yang dikatakan Le Pen, “*fears*” dan “*warnings*” menegaskan adanya ancaman jika terorisme muncul dari akibat arus imigrasi yang menuju wilayah Eropa. Marine Le Pen dan partainya, National Front, di Prancis justru lebih keras mengatakan kepada para imigran. Le Pen mengatakan “Jika anda datang ke negara kami, jangan

berharap dirawat, dilayani, atau anak-anak Anda akan dididik tanpa biaya. Waktu bermain Anda sudah berakhir” (Hasan, 2019). Pernyataan ini justru lebih tegas dari pernyataan yang sebelumnya diucapkan oleh Le Pen.

Speech Act selanjutnya yakni pernyataan yang dikeluarkan oleh Donald Tusk selaku Pimpinan Dewan Eropa yang menyebut kasus ini “*Everything is immigration*”, Tusk mengatakan jika mengamankan perbatasan Uni Eropa adalah suatu desakan penting dalam menyikapi krisis pengungsi (Traynor, Migration crisis: Hungary PM says Europe in grip of madness, 2015). Claude Juncker selaku Pimpinan Komisi Eropa juga mengatakan jika masalah dari krisis ini merupakan hal yang penting dan utama bagi Uni Eropa. Juncker memandang jika masalah krisis ini menjadi momen ketegasan bagi Uni Eropa (Juncker, State of the Union 2015, 2015).

Dalam pernyataan resmi dari Dewan Eropa, ketika mengumumkan langkah-langkah baru, menyatakan “*It will be temporary and extraordinary measure which is necessary to end the human suffering and restore public order*”. Artinya ini akan menjadi tindakan sementara dan luar biasa yang diperlukan untuk mengakhiri penderitaan manusia dan memulihkan ketertiban umum (Tusk P. r., Remarks by President Donald Tusk after the meeting of the EU heads of state or government with Turkey, 2016). ‘*Extraordinary measure*’ yang dikatakan oleh Dewan Eropa telah menjadi sekuriti dalam menyikapi masalah imigran gelap ini. Karena itu menyampaikan kepada khalayak umum bahwa perlu untuk menjalankan kebijakan di luar kebiasaan dan nonreguler dan situasi seperti itu. Lalu, penggunaan ‘*restore public order*’ sangat sejalan dengan literatur sekuritisasi Buzan karena

mengedepankan gagasan bahwa ada ancaman terhadap situasi ini sehingga maka *extraordinary measure* tersebut harus dilegitimasi.

Sementara Donald Tusk juga menekankan dalam sambutannya pada 2017, “*Yesterday’s discussion on migration confirmed the hierarchy of our aims, where protecting our territory, protecting our external borders as well as stemming illegal migration com first*”. Intinya pada diskusi tersebut dikatakan bahwa mereka memprioritaskan membendung migrasi ilegal dan melindungi perbatasan eksternal serta melindungi wilayah mereka. Ini sangat jelas menunjukkan bahwa tujuan utamanya Uni Eropa adalah melindungi wilayahnya dari ancaman berupa imigran. Hak asasi manusi bahkan tidak sama sekali dibahas di dalam pertemuan antara anggota tersebut (Tusk P. S., Remarks by President Donald Tusk following the European Council meetings on 14 and 15 December 2017, 2017).

Pada tanggal 1 Juli 2018, Austria menjadi presiden bergulir Dewan Uni Eropa selama enam bulan. Pemerintah Austria yang dipimpin oleh Kanselir Sebastian Kurz mengatakan jika kontrol imigran adalah komitmennya. Dia menggunakan moto “*A Europe That Protect*” dan telah mendrafkan bagian keamanan dan perjuangan melawan imigrasi ilegal menjadi lebih dulu dalam prioritas agendanya (Barzacha, Austria now holds the E.U. presidency. Expect a tougher stance on immigration., 2018).

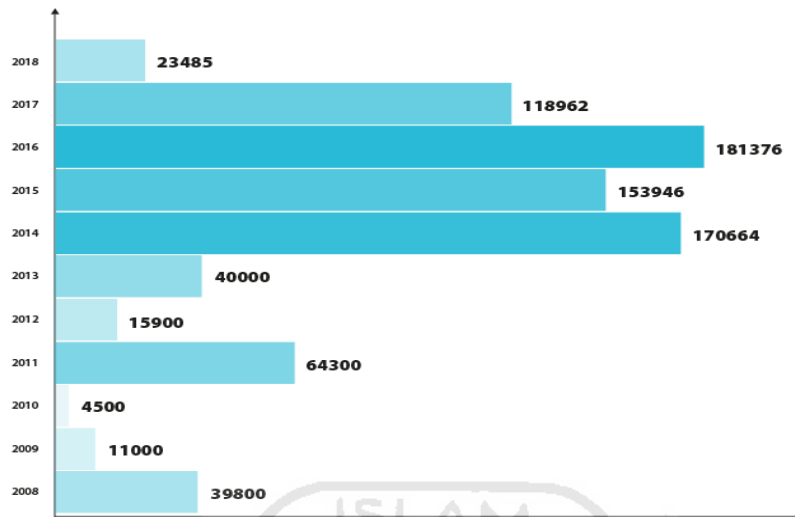
Masyarakat di Uni Eropa banyak mengaitkan imigran dengan kejahatan, terorisme, dan kerusuhan sosial. Media di seluruh Uni Eropa telah memberitakan banyak liputan pada krisis ini, baik secara negatif maupun positif, seperti yang diesplorasi oleh Miker Berry, Inaki Garcia, dan Kery Moore dalam penelitiannya

tentang liputan media di lima negara Uni Eropa. Temuan mereka menunjukkan bahwa sebagian besar cakupan liputan menggunakan istilah negatif dalam menggambarkan imigran, meskipun ada yang meliputnya secara positif dari surat kabar tertentu (Berry, Garcia-Blanco, & Moore, 2015).

3.2 Dampak Konstruksi Isu Imigran sebagai Ancaman Eksistensial

Buzan dkk. mengatakan bahwa aktor dalam isu keamanan memberikan konstruksi persoalan objek keamanan menjadi terpolitisasi ke dalam beberapa sektor keamanan, sektor-sektor keamanan tersebut melingkupi militer (*forceful coercion*), politik (otoritas, status pemerintah, dan pengakuan), ekonomi (perdagangan produksi, dan finansial), lingkungan (aktivitas manusia dan *the plentary biosphere*), sosial (*collective identity*) dan individu (Barry Buzan, 1998, p. 7).

Krisis migrasi Eropa menjadi ancaman eksistensial kawasan ini, dapat dilihat dari arus gelombang masuknya imigran dari luar wilayah Uni Eropa. Tahun 2015 menjadi puncak dari masuknya arus imigran ini ke wilayah Eropa yang kurang lebihnya mencapai satu juta. Umumnya ada beberapa rute yang dilalui oleh para imigran ini yakni, Rute Mediterania Tengah (*Central Mediterranean Route*), Rute Mediterania Barat (*Western Mediterranean Route*), Rute Mediterania Timur (*Eastern Mediterranean Route*), Rute Afrika Barat (*Western African Route*), Rute Perbatasan Darat Timur (*Eastern Land Border Route*), dan Rute Balkan Barat (*Western Balkan Route*).



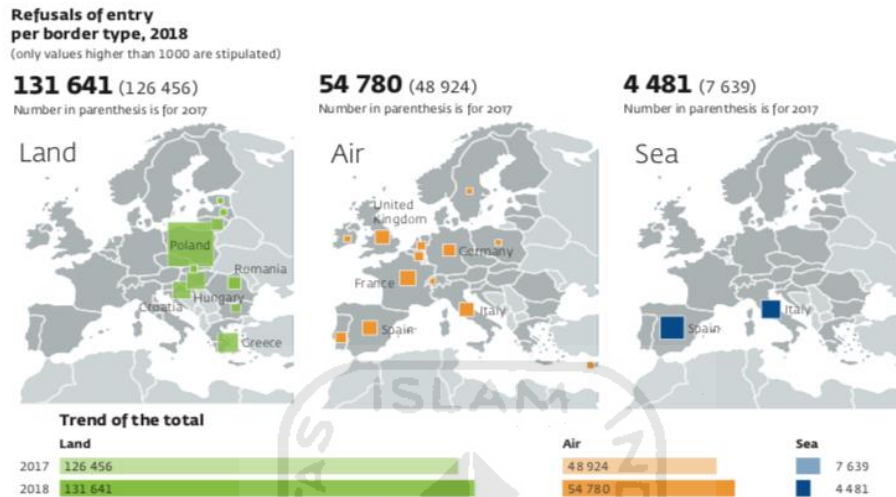
Gambar 7. Grafik Pergerakan Imigran Ilegal

Sumber : Frontex Europa European Border and Coast Guard Agency (FRONTEX, 2018).

Mereka menggunakan rute ini untuk melewati perbatasan secara ilegal. Akibatnya, negara-negara anggota terpaksa ikut andil untuk menyoroti hal ini. Situasi ini dapat dicermati pada tahun 2016, ketika 181.376 imigran ini melewati Rute Mediterania Tengah. Angka ini merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun 2015 yang berkisar 153.946 sekitar 10% lebih tinggi dari tahun 2016. Sebagian besar imigran ini berangkat dari Libya, tempat kelompok kriminal mengambil keuntungan dari berbagai kelompok yang lain untuk menguasai jaringan penyelundupan di Libya (FRONTEX, 2018).

Pada tahun 2018, 190.930 imigran ini ditolak masuk ke wilayah Uni Eropa, sedikit meningkat dibandingkan tahun 2017. Mereka tidak hanya bergerak dari laut,

Gambar 8. Peta Penolakan masuknya Imigran Perbatasan 2018



tetapi juga udara dan daratan sehingga menjadi pertimbangan ketat dari EU untuk mengawasi imigran ilegal ini. Pada tahun 2018, Ukraina, Rusia, dan Albania menolak hampir 60% dari total imigran yang masuk. Penolakan ini terus meningkat setiap tahunnya dari 2014 hingga 2018 (FRONTEX, 2018, p. 16).

Sumber : Frontex Europa European Border and Coast Guard Agency

(FRONTEX, 2018, p. 18)

Data tersebut memperlihatkan jika terjadinya penolakan terhadap imigran lewat tiga transmisi yakni udara, daratan, dan laut. Jalur administratif seperti udara dan daratan juga dimanfaatkan oleh para imigran untuk memanipulasi dokumen-dokumen. Pada 2018 terdapat peningkatan jumlah imigran yang melalui jalur darat dan udara, yakni jalur darat sebanyak 131.641 dan udara 54.780 orang, sementara jalur laut menurun menjadi 4.481 orang (FRONTEX, 2018, p. 18). Bandara Ataturk Instambul yang menjadi keberangkatan utama para imigran dideteksi secara ketat karena angka penipuan dokumen di bandara ini paling tajam, sekitar 355 terdeteksi

melakukan penipuan pada 2017. Sementara itu, Ukraina dan Serbia menjadi tujuan utama jalur darat yang paling besar terjadinya manipulasi dokumen (FRONTEX, 2018, p. 19).

Dampak konstruksi dari isu ini yang di antaranya paling kentara adalah di Italia. Pada 2018 Pemerintah Italia telah mengambil sikap keras terhadap migrasi ini dengan Menteri Dalam Negari Matteo Salvini untuk memperkuat perbatasan mereka. Dalam praktiknya, pihak berwenang Italia telah mencegah kapal-kapal kemanusiaan yang tengah membantu imigran ilegal yang berlabuh di perairan Mediterania, tepatnya di pelabuhan-pelabuhan Italia (DW, 2018). Polandia juga menolak untuk menerima imigran gelap, terutama di bawah skema kuota. Warsawa telah memperkuat keamanan nasional karena membatasi migrasi ke kawasan Eropa Tengah. Pemerintah Polandia telah menyerukan peningkatan dukungan untuk Frontex dan memperluas kekuatan agensinya agar lebih baik dalam mengatasi migrasi yang tidak teratur di perbatasan eksternal (DW, 2018).

Pemerintah Prancis juga melakukan hal yang sama mendorong pendekatan terkoordinasi untuk migrasi yang tidak teratur ke Uni Eropa. Presiden Emmanuel Macron mengatakan harus ada “sistem yang efisien, solidaritas dan tanggung jawab”. Macron telah menyerukan untuk memperkuat Frontex (Badan Penjaga Perbatasan dan Pantai Eropa), memerangi perdagangan manusia, dan menciptakan sistem yang adil dalam merelokasi suaka di seluruh blok. Pemerintah Prancis juga telah mendorong perjanjian bilateral dengan negara asal dan negara transit. Adapun, di dalam negerinya mereka secara tegas mengeluarkan langkah-langkah keras

terhadap imigran gelap, termasuk hukuman berat dan menahan mereka selama 90 hari (DW, 2018).

Austria, Bulgaria, Hongaria, Republik Ceko, Slovakia, dan Romania menolak menerima pencari suaka datang ke Uni Eropa selama musim panas tahun 2015. Keenam negara di sayap timur Uni Eropa ini menolak menerima pengungsi dan migran manapun dengan mengutip masalah keamanan dan mempertanyakan alasan hukum bagi Uni Eropa yang menetapkan kuota orang untuk menerima kuota tetap pada setiap negara anggota (Ekblom, 2019). Keenam negara ini juga menolak menandatangani pakta migrasi PBB tentang *principle of separating legal and illegal migration* (Schaart, 2018).

Gelombang demonstrasi pun terjadi terhadap penolakan masuknya imigran ke wilayah Eropa oleh Kelompok Anti-Islam yang bernama PEGIDA. Aksi ini dilakukan pada 2016 lalu, di Dresden, Jerman, dengan diikuti 8.000 orang. Aksi ini menanggapi masuknya 1,1 juta imigran yang tiba di Eropa pada 2015 dan dengan dalih menentang islamisasi di Jerman. Menurut data Kementerian Dalam Negeri Jerman, di kuartal akhir 2015 ada 208 aksi antiimigran di negara itu, naik dari 95 dibanding tahun lalu (Armandhanu, 2016).

Bersamaan pula yang terjadi di Calais, utara Prancis, puluhan orang ditahan dalam aksi antiimigran (Armandhanu, 2016). Di Praha, Ceko, diperkirakan ada 2.200 orang dari PEGIDA yang menggelar aksi dan terjadi keributan dengan rombongan pendukung imigran (Armandhanu, 2016). Aksi serupa juga dilakukan di Warsawa, Polandia, dimotori oleh kelompok sayap kanan ekstrem Ruch Narodowy (Armandhanu, 2016). Pemimpin kelompok tersebut, yakni Robert

Winnicki menyatakan bahwa mereka berdemo menentang Islamisasi Eropa, serta menentang adanya imigrasi dan melawan invansi (Armandhanu, 2016). Di Dublin, Irlandia, kelompok PEGIDA ini juga melakukan aksi dan bentrok dengan massa antidiskriminasi (Armandhanu, 2016).

Di Birmingham, Inggris, PEGIDA diikuti oleh 200 orang. Tommy Robinso sebagai koordinator aksi ini mengatakan bahwa arus imigran tahun lalu yaitu 2015 jangan sampai terulang lagi (VOA, 2016). Beberapa pendukung PEGIDA ini menyampaikan keprihatinan tentang kegagalan sejumlah warga muslim berintegrasi dengan masyarakat Barat (VOA, 2016). Sebuah survei yang dilakukan oleh Chantam House, meunjukkan warga dari beberapa negara besar di Eropa menginginkan penerapan regulasi larangan masuk bagi warga dari negara mayoritas Muslim. Berdasarkan jajak pendapat tersebut, 55% responden dari 10 negara Eropa ingin menghentikan seluruh imigrasi dari negara-negara mayoritas Muslim dan 25% memilih bungkam dan 20% memilih menentang aturan yang dianggap diskriminatif (Suastha, 2017). Makin membesarnya PEGIDA membuat para fasis bigot antiimigran ini semakin membesar di Eropa. Wroclaw, di Polandia, ribuan aksi ini melawan imigran muslim yang diduga akan memperkosa anak-anak Eropa, dan mereka mengintimidasi warga muslim di negara itu (Dhani, 2016).

Isu imigran di wilayah Eropa cenderung menjadi beban bagi para anggota yang terutama paling dirugikan dalam hal ini. Seperti Yunani, Perdana Menteri Alexis Trapsi mendesak negara-negara anggota Uni Eropa lainnya untuk meringankan beban di negara-negara garis depan dengan menempatkan kembali imigran di bawah sistem realokasi. Artinya, ancaman eksistensial begitu nyata bagi

para anggota sekaligus menjadi ancaman bagi keamanan negaranya. Mereka memberlakukan sikap yang tegas dan keras dengan adanya arus masuk imigran ini serta terus menyerukan keadilan maupun solidaritas untuk para anggota negara Uni Eropa lainnya.

Dikatakan oleh Buzan dkk. Bahwa, “*By labeling it as security, an agent claims a need for, and a right to treat it by extraordinary means*”.

Penting untuk menggarisbawahi bahwa audiens memiliki peran yang penting dalam memainkan konsep sekuritisasi. Sekuritisasi ini merupakan suatu proses dalam mencari kebenaran yang hendak dicapai atau proses intrasubjektif. Dalam hal ini terdapat suatu negosiasi yang terjadi secara terus menerus antara aktor sekuritisasi dengan audiens. Audiens memiliki hak dalam memilih untuk menerima ataupun memilih untuk menolak isu atau masalah yang diajukan oleh aktor sekuritisasi. Audiens akan menerima atau menolak isu atau masalah tersebut sebagai ancaman keamanan dan mereka juga yang melegitimasinya. Pada akhirnya, konsep keamanan tidak akan berada di subjek ataupun objek melainkan berada di antara keduanya (Buzan, Wæver, & Wilde, 1998)

Merujuk pada konteks di atas, masalah keamanan ini dipandang sebagai hasil konstruksi yang dilakukan oleh pelaku sekuritisasi dan kemudian disetujui oleh publik sebagai *target audience*. Dalam hal ini, kebijakan yang keras dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa dalam menolak masuknya imigran masuk ke kawasan Eropa, disetujui oleh masyarakat Uni Eropa. Salah satunya disetujui oleh aksi-aksi publik yang diinisiasi oleh gerakan PEGIDA. *Speech act* yang dibangun oleh pelaku sekuritisasi ini berhasil menargetkan audiens. Proses intrasubjektif

sekuritisasi ini menghasilkan adanya *extraordinary measure* (pengusiran, penolakan, dan Operasi Sophia) (RT, 2016).

Dalam hal ini, dampak dari konstruksi persoalan keamanan pada isu imigran ini di antaranya melingkupi masalah di antaranya militer, politik, lingkungan, sosial dan individu. Proses ini berkelanjutan pada jangkauan *politized* yang berarti dampak isu ini telah masuk pada ranah kebijakan publik dengan campur tangan pemerintah dalam hal alokasi sumber daya, atau kebijakan lainnya (Barry Buzan, 1998, p. 23).

3.3 Sekuritisasi dalam Operasi Sophia

Buzan dkk. mengatakan bahwa jangkauan isu ini berdampak pada *to securitized*, yang berarti isu ini telah dianggap sebagai ancaman keamanan yang nyata dan membutuhkan tindakan yang darurat dengan menerapkan prosedur di luar prosedur politik yang dianggap sah untuk dilaksanakan (Barry Buzan, 1998, p. 23). Keamanan di sini adalah tentang bertahan hidup jika suatu masalah dilampirkan sebagai suatu ancaman eksistensial. Lalu, klaim yang berupa ancaman keamanan tersebut dapat dibenarkan untuk penggunaan tindakan di luar batas atau *extraordinary measures* dalam menanganinya (Buzan, 1998, p. 21). *Extraordinary measures* alias tindakan darurat yang diambil oleh aktor sekuritisasi sebagai langkah penanganan terhadap ancaman eksistensial merupakan hasil adopsi secara darurat, terpaksa dan sepihak (Buzan, 1998, p. 52). *Extraordinary measures* dalam hal ini dilakukan oleh Med EUNAVFOR atau Operasi Sophia.

Seorang spesialis Libya di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, Tarek Megerisi mengatakan bahwa,

“Being as vague as possible so countries like Italy and Hungary can say this is our tool for stopping migration, and countries like Germany and Sweden can say we’re saving lives” (Campbell, 2019).

Artinya, ini menekankan bahwa operasi ini dijadikan alat untuk negara seperti Italia dan Hungaria dapat menghentikan migrasi. Terlepas dari pernyataan Megerisi terkait dugaan bahwa operasi ini menjadi mata uang politik.

Operasi Med EUNAVFOR atau Operasi Sophia merupakan salah satu elemen dari Uni Eropa yang responsif terhadap migrasi di Eropa. Operasi ini diluncurkan bulan Mei 2015 untuk menanggapi lonjakan persimpangan migran di Laut Mediterania dari Libya dan menjadi instrumen keamanan maritim. Operasi ini tidak hanya berupa mengatasi komponen fisiknya, tetapi juga komponen dari akar penyebab konflik, kemiskinan, dan penganiayaan. Tujuan utamanya yakni mengganggu model bisnis penyelundup dengan mengidentifikasi, menangkap, dan membuang kapal yang digunakan atau diduga digunakan oleh mereka, serta melatih penjaga pantai dan angkatan laut Libya dan berkontribusi pada implementasi embargo senjata PBB di laut lepas pantai Libya (European Commission, 2015).

Operasi ini didukung oleh Resolusi DK PBB No 2240 tahun 2015, mengatur semua tindakan khusus dan sesuai dengan keadaan menghadapi penyelundupan migran atau perdagangan manusia (Estrada-Cañamares, 2016).

Mandat Operasi Sophia berisi tentang (1) Membuat mekanisme pemantauan pada peserta pelatihan untuk menjamin efisiensi jangka panjang pelatihan penjaga pantai dan angkatan laut, (2) Melakukan kegiatan pengawasan dan pengumpulan

informasi tentang perdagangan ilegal senjata di lepas pantai Libya sesuai UNSCR 2146 (2014) dan UNSCR 2357 (2017), (3) Menumbuhkan kemungkinan berbagi informasi tentang perdagangan manusia dengan lembaga penegak hukum seperti FRONTEX dan EUROPOL dan anggota lainnya (EUNAVFOR MED, 2018). Pada Juni 2016, mandate ini diamandemen untuk memasukkan dua tugas pendukung yakni (4) Pengembangan kapasitas dan pelatihan penjaga pantai dan angkatan laut Libya, dan (5) Berkontribusi pada implementasi embargo senjata PBB di laut lepas pantai Libya sesuai dengan Dewan Keamanan PBB Resolusi 2292 (2016) dan 2357 (2017) (EUNAVFOR MED, 2018).

Pada Juli 2017, mandat diamandemen lagi untuk memasukkan unsur pengawasan kegiatan tentang (6) Perdagangan ilegal (terutama ekspor minyak dari Libya) sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2146 (2014) dan 2362 (2017), (7) Menyiapkan mekanisme pemantauan dengan efisiensi jangka panjang pada pelatihan Penjaga Pantai dan Angkatan Laut Libya, dan (8) Meningkatkan pertukaran informasi dengan negara anggota bagian penegak hukum mengenai perdagangan manusia sehingga dengan demikian negara-negara anggota dapat menghargai situasi, kesadaran dan keamanan di Mediterania Tengah terutama dengan otoritas Libya dan dengan UE serta lembaga penegak hukum (Tardy, 2017).

Tahap Operasi Sophia dirancang dalam 4 fase:

- 1) Penyebaran kekuatan untuk membangun pemahaman komprehensif tentang aktivitas dan metode penyeludupan.

- 2) Melakukan *boarding*, pencarian, penyitaan dan pengalihan kapal yang dicurigai digunakan untuk penyelundupan di laut lepas dan di bawah kondisi yang ditentukan oleh hukum internasional.
- 3) Memperluas aktivitas ini lebih lanjut dalam tindakan yang diperlukan terhadap kapal dan aset terkait penyelundupan manusia atau perdagangan manusia di dalam wilayah perairan internasional sesuai dengan kerangka hukum yang diterapkan oleh UNSCR dan mengikuti persetujuan kedua belah pihak.
- 4) Dewan Eropa bertanggung jawab untuk menilai apakah kondisi untuk transisi antara fase operasi telah terpenuhi. Di sisi hukum, semua kegiatan dilakukan di setiap fase tetap mematuhi dan menghormati hukum internasional, termasuk hak manusia, kemanusiaan, dan hukum pengungsi serta prinsip "*non refoulement*" diikuti, artinya tidak ada orang yang boleh mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun, ke perbatasan wilayah Negara pihak yang akan mengancam kehidupan dan kebebasan pengungsi karena alasan ras, agama, kebangsaan dan keanggotaan pada kelompok sosial tertentu (Tardy, 2017, p. 2).

Gambar 9. Operasi Uni Eropa di Laut Mediterania

87		smugglers & traffickers arrested by Italian authorities following EUNAVFOR Med activities
296		vessels removed from criminal organisations availability
25993		migrants rescued
178		rescue operations
38031		migrants rescued through EUNAVFOR Med aero-naval support

Sumber : EUROPEAN UNION (EU, 2016).

Menurut angka resmi dari data di atas, Operasi Sophia sejak awal pembentukan sudah berhasil menetralkan 296 perahu, menangkap 87 tersangka penyelundup dan dipindahkan ke pihak berwenang Italia, serta menyelamatkan 38.031 imigran (EU, 2016). Bukti kehadirannya sedikit membantu membendung aliran imigran yang melintasi Laut Tengah Mediterania. Menurut Badan Penjaga Perbatasan dan Pantai Eropa (Frontex) Angka ini menurun pada 2015 dibandingkan 2014 (dari 170.000 menjadi 154.000), tetapi meningkat pada tahun 2016 sekitar 181.000. Namun angka kematian imigran yang dapat direkam di pusat Mediterania untuk tiga tahun terakhir, pada 2015 ada 1.764 korban, 2016 ada 2.484 korban dan 2017 ada 2.158 korban kematian di laut ini. Angka kematian pada tahun tersebut naik secara perlahan di perairan internasional tersebut (House Of Lords, 2017, p. 4).

Operasi Sophia saat ini memiliki akses keenam kapal (satu dermaga *platform* pendaratan, satu kapal pelengkap, satu kepala survey, tiga fregat, empat helikopter, dan tiga pesawat. Jumlah referensi untuk biaya umum Operasi Sophia dari Juli 2016 hingga 27 Juli 2017 yakni 6,7 Juta Euro. Aset militer dan personel disediakan oleh negara-negara anggota yang berkontribusi. Total personel ada 1291, disumbangkan

oleh 24 negara anggota EU yaitu Austria, Belgia, Bulgaria, Cyprus, Rep.Ceko, Spanyol, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Inggris, Yunani, Hungaria, Italia, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Slovenia, Slovakia, dan Swedia. Dan tiga Negara di antaranya yang belum bergabung atau menyumbang personel yaitu Denmark, Kroasia dan Irlandia (House Of Lords, 2017, p. 5).

Operasi Sophia juga menggelar pelatihan pertama pada 2016 di perairan internasional yang berfokus pada peningkatan angkatan laut Libya terutama menciptakan kemampuan penjaga pantai dalam melakukan kegiatan pencarian dan penyelamatan bersama untuk mengganggu penyelundupan dan perdagangan manusia. Secara total, ada 93 anggota penjaga pantai angkatan laut Libya yang telah menerima pelatihan. Pelatihan selanjutnya dilaksanakan pada Januari 2017, fokus pada modul untuk memberikan lebih banyak spesialis pada para pemimpin senior penjaga pantai dan melibatkan mereka untuk mengoperasikan kapal-kapal yang digunakan penjaga pantai angkatan laut (House Of Lords, 2017, p. 12)

Namun, penting terhadap beberapa risiko yang terlibat ketika bekerja sama dengan penjaga pantai Libya. Pertama, menciptakan budaya dengan penjaga pantai Libya menjadi tantangan besar terutama menghormati hak asasi manusia para imigran. 14 Februari 2017, The Times melaporkan bahwa mereka telah melihat petugas penjaga pantai Libya mencambuk, memukul, dan mengancam akan membunuh para imigran yang telah diselamatkan (Kington, Video Shows Libyan coastguard whipping rescued migrants, 2017). Senada dengan laporan dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mereka ditahan dan

tidak manusiawi terhadap pelanggaran HAM kepada migrant di Libya. 13 Desember 2016, beberapa staf LSM juga telah menceritakan berbahayanya intersepsi yang mengancam jiwa orang-orang di Libya, diyakini mereka penjaga pantai dari Libya (OHCHR, 2016).

Begitu pula Amnesty International UK mengatakan pihaknya kecewa terhadap Operasi ini dengan pendekatan mencari dan menghentikan migrasi yang keluar dari Libya melalui rute laut, karena ini prospek untuk mengembalikan atau menjebak orang-orang di tempat yang sangat tidak aman disituasi Negara mereka. Sebab, tidak adanya perbaikan yang mendasar dalam situasi atau kapasitas HAM dan Kemanusiaan di Libya. Dengan ini, fokus Uni Eropa pada penjaga pantai Libya berisiko memperpanjang dan memperburuk risiko terhadap nyawa dan kebebasan dan pelanggaran hak asasi manusia laijinya terutama memperluas kegiatan penyelundup dan perdagangan manusia (House Of Lords, 2017, p. 13)

House of Lord mengeluarkan laporan pada 12 Juli 2017, dalam wawancaranya dengan salah seorang armada Angkatan Inggris yang dikerahkan ke Operasi Triton yaitu Mr. Horbart. Mr. Horbart mengatakan jika asset yang digunakan dalam Operasi Sophia pencarian dan penyelamat tidak begitu cocok. Karena dalam melakukan pencarian kemanusiaan dan menyelamatkan para imigran ada kapal yang lebih baik untuk melakukan itu dan lebih cocok dari pada yang sekarang. Sebab, cara mandat Sophia berevolusi menjadi polisi atau operasi kemanusiaan yang tidak spesifik pada operasi ini (Tardy, 2017, p. 3).

Namun, pada realita lainnya, Operasi Sophia ini telah menyebabkan beberapa konsekuensi, yang paling disorot adalah kehadiran operasi ini telah

menciptakan kesan yang tidak bertindak sebagai pencegah bagi migran, karena imigran lebih baik ditangani dengan penjaga pantai Italia, kapal FRONTEX, dan LSM. Yang dilakukan oleh Operasi Sophia sangat terbatas dibandingkan dengan yang dilakukan oleh pihak-pihak lain, karena mereka biasanya menggunakan perahu karet di batas perairan teritorial Libya dari pada kapal yang lebih besar, dan karenanya mereka bertindak lebih jauh dari misinya (Tardy, 2017, p. 4).

Demikian tahap fase pengaplikasian Operasi Med Eunafot atau Operasi Sophia dalam menjalankan misinya masih bertabrakan dengan kepentingan nasional antar Negara yang bergabung, di antaranya Fase 3 dan 4 menjadi kendala. Fase 1 selesai pada akhir 2015, yang selanjutnya fase itu berjalan pada bulan oktober dalam melanjutkan fase 2. Penyebab besar dari tidak optimalnya misi ini berjalan karena situasi Libya yang menghambat pemberian resmi untuk hadirnya Uni Eropa di tengah masalah imigran ilegal di wilayah perairan Libya. Sebab, Operasi Sophia hanya berada di luar wilayah Libya sehingga penyelundup susah untuk ditangkap (Ventrella A. , 2016).

Akan tetapi dalam operasi ini ada beberapa hal yang berdampak terhadap Uni Eropa, *pertama*, adanya Operasi Sophia pada 2017, terkoordinasi dengan beberapa negara anggota dalam sedikitnya menekan angka kematian yang ada di laut mediterania (IOM, 2017). Kedua, Sejak awal terbentuk aktif pada 2015, Operasi ini telah berkontribusi pada penangkapan dan pemindahan imigran ke otoritas Italia dari 143 tersangka penyelundup manusia, dan telah menetralsir 545 kapal. Selain itu, membantu menyelamatkan 44.251 nyawa imigran (EU, 2016). Dengan adanya Operasi Sophia, membuktikan bahwa operasi ini sebagai bentuk *extraordinary*.

Dibuktikan dengan diikuti oleh 24 negara anggota yang turut bekerja sama dalam menangani imigran gelap, setidaknya-tidaknya operasi ini sekaligus dilakukan perpanjangan masa kerjanya pada 2017.



BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Pada tahun 2015, Uni Eropa mengalami fenomena masuknya gelombang imigran secara besar-besaran akibat *Arab spring*. Brookings Institution, mengatakan hampir dua juta orang telah meninggalkan rumah mereka akibat dampak dari gejolak *Arab Spring* di Afrika Utara dan Timur Tengah, di antaranya telah menumbangkan para penguasa di Tunisia, Mesir, Libya, Yaman dan pemberontakan sipil di Bahrain, Suriah, Aljazair, Irak, Yordania, Kuwait, Maroko dan Oman (Patnistik E. , 2012). Adanya konflik *Arab Spring* ini memaksakan sebagian besar masyarakat yang berasal dari negara-negara konflik seperti Suriah, Libya, Tunisia, Yaman, Mesir, dan Bahrain untuk bermigrasi ke Uni Eropa demi menyelamatkan diri mereka dari konflik tersebut (Patnistik E. , 2012). Selain karena konflik atau perang, faktor ekonomi, akses terbatas dan geografis menjadi alasan penting bergeraknya para imigran ke Eropa (Bartoni, 2017). Di antaranya laut mediterania yang berdekatan dengan Benua Eropa, bagian Italia dengan Tunisia dan Libya berjarak 73 ml dan 159 mil dari Libya. Maka daripada itu, Italia menjadi salah satu negara di Uni Eropa paling banyak didarati lewat jalur laut.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat pertanyaan, bagaimana sekuritisasi isu imigran dilakukan oleh Uni Eropa dalam Operasi Sophia tahun 2015-2018? Sekuritisasi dalam penelitian ini dianalisis menggunakan dasar teori yang disampaikan oleh Buzan dkk

. *Pertama*, adanya *existential threat* yaitu *self referential object* dan *speech act*. Bahwa ketika terjadinya proses sekuritisasi, keamanan ini merupakan praktik *self-referential* yang tidak objektif, tergantung pada persepsi, interpretasi, dan reaksi *target audience* terhadap *existential threat* tertentu. Praktik tersebut yang kemudian dapat menjadikan suatu masalah sebagai isu keamanan. Proses terjadinya perubahan masalah menjadi sebuah isu keamanan bukan karena adanya ancaman nyata, akan tetapi dari adanya penegasan masalah yang kemudian dijadikan sebagai suatu ancaman (Barry Buzan, 2003, pp. 23-24).

Penegasan masalah dalam konteks di atas dilampirkan melalui grafik dari gelombang masuknya imigran ke Eropa. Aktor sekuritisasi merespons berbagai ancaman yang ada dengan membuat Operasi Sophia. Menjustifikasi konstruksi isu imigran sebagai ancaman eksistensial bagi Uni Eropa. Buzan dkk. mengatakan, dalam mengklaim sebuah isu politis akan menjadi isu yang disekuritisasi, modal yang dimiliki adalah *Securitizing Actor*, yakni pemerintah, partai/kelompok oposisi atau masyarakat. Untuk melihat sebuah isu ini yang dikonstruksi sebagai ancaman eksistensial dapat ditempuh melalui *Speech Act*.

Berkenaan dengan hal tersebut, para elit Eropa seperti Victor Orban (Perdana Menteri Hongaria), Greet Wilders (anggota Parlemen Belanda), Le Pen (anggota Parlemen Uni Eropa), Donald Tusk (Pimpinan Dewan Uni Eropa), Claude Juncker (Pimpinan Komisi Eropa), dan Sebastian Kurz (Presiden Dewan Uni Eropa) telah cukup untuk menjustifikasi konstruksi isu ini sebagai ancaman eksistensial telah ditempuh melalui *Speech Act* yang dibangun oleh pernyataan para elit Eropa. Lalu, aktor tersebut akan berusaha menggunakan cara apapun untuk

melawan ancaman keamanan yang sudah diklaimnya (Buzzan, 1998). Untuk masyarakat, PEGIDA sebagai kelompok yang menolak masuknya imigran di Eropa menjadi salah satu bentuk tanggapan dari publik. PEGIDA ini memotori adanya aksi yang bergulir di beberapa negara seperti Jerman, Prancis, Polandia, Irlandia, Inggris, dan Ceko.

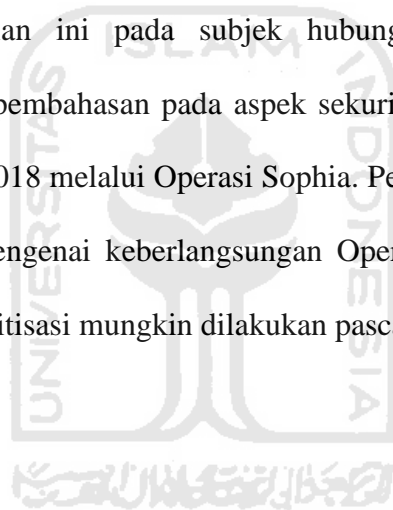
Kedua, adanya *emergency action* yaitu *extraordinary measure* yakni Operasi Sophia sebagai bentuk sekuritisasi di Eropa. Uni Eropa merespons ancaman ini dengan mendirikan Operasi Sophia pada 2015. Operasi ini bertujuan untuk mengganggu model bisnis penyelundup, mengidentifikasi, menangkap, dan membuang kapal yang digunakan atau diduga menjadi alat perdagangan manusia sebagai upaya untuk menangkal masuknya imigran (Commission, Migrant Smuggling, 2015). Hasilnya terkoordinasi dengan beberapa negara anggota, lalu sedikitnya menekan angka kematian yang ada di laut mediterania (IOM, 2017). Operasi ini juga berkontribusi pada penangkapan dan pemindahan imigran ke otoritas Italian dari 143 tersangka penyelundup manusia, dan telah menetralsir 545 kapal, lalu menyelamatkan 44.251 nyawa imigran. Dengan adanya Operasi Sophia, membuktikan bahwa operasi ini sebagai bentuk *extraordinary*. Dibuktikan dengan diikuti oleh 24 negara anggota yang turut bekerjasama dalam menangani imigran gelap, setidaknya operasi ini sekaligus dilakukan perpanjangan masa kerjanya pada 2017.

Ketiga, *breaking free of rules* yaitu aturan yang dilanggar oleh Uni Eropa. Sebab, potensi yang dilanggar oleh operasi ini dengan pendekatan mencari dan menghentikan migrasi yang keluar dari Libya melalui rute laut, membuat prospek

untuk mengembalikan atau menjebak orang-orang di tempat yang sangat tidak aman disituasi Negara mereka. Karena tidak adanya perbaikan yang mendasar dalam situasi atau kapasitas HAM dan Kemanusiaan di Libya. Dengan ini, fokus Uni Eropa pada penjaga pantai Libya berisiko memperpanjang dan memperburuk risiko terhadap nyawa dan kebebasan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya terutama memperluas kegiatan penyelundup dan perdagangan manusia.

4.2 Rekomendasi

Kontribusi penelitian ini pada subjek hubungan internasional yakni melengkapi literatur dan pembahasan pada aspek desekuritisasi isu imigran di Uni Eropa pada tahun 2015-2018 melalui Operasi Sophia. Penulis merekomendasikan penelitian lebih lanjut mengenai keberlangsungan Operasi Sophia atau melihat bagaimana proses desekuritisasi mungkin dilakukan pasca Operasi Sophia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barry Buzan, O. W. (1998). *Security A New Framework for Analysis*. Colorado: Lynne Rinner Publishers.
- Borragan, M. C.-S. (2016). *European Union Politics (5th ed.)*. New York: Oxford University Press.
- Buzan, B. (1991). *People, States and Fear: An Agenda for Security Analysisi in the PostCold War Era*. Brighton: Weatsheaf.
- Ikbar, Y. (2014). *Metodologi dan Teori Hubungan Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Wæver, O. (1993). *Societal Security: The Concept*. In O. Wæver, B. Buzan, M. Kelstrup, & P. Lemaitre, *Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe*. New York: St. Martin's Press.

Artikel Jurnal

- Bank, T. W. (2018). *GDP Current US\$ European Union*. Washington, DC: Report Fraud or Corruption.
- Center, P. R. (2016). *Number of Refugees to Europe Surges to Record 1.3 Million in 2015*. Washington, DC: Pew Research Center Survey Reports.
- House Of Lords. (2017). *Operation Sophia:a failed mission*. Parliament UK. London: Authority of the House of Lords.
- Lestari, P. (2018). Frontex (European Border Coast and Guard Agency) Securitization Agenda in Greece Illegal Immigrant Crisis. *JOM FISIP UNRI*, 5(1), 1-15.
- Mike Berry, Inaki Garcia-Blanco, Kerry Moore. (2015). *Press Coverage of the Refugee and Migrant Crisis in the EU: A Content Analysis of Five European Countries*. Carrdif School of Journalism, Media and Cultural Studies. Carrdif: Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies.
- Monar, J. (2001). The Dynamics of Justice and Home Affairs: Laboratories, Driving Factors and Costs. *Journal of Common Market Studies*, 39(4), 747-764.
- Pertiwi, L. A. (2016, 03). Kompleksitas Rezim di Uni Eropa:Upaya Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(3), 218-283.
- Roytanda, N. (2019, 02 18). Kebijakan Uni Eropa Terhadap Krisis Pengungsi: Analisis Sekuritisasi Dalam Pembentukan EU-Turkey Statements. *Dspace UII*, 1-85.
- Sari, A. K. (2015). Upaya Uni Eropa dalam Menangani Pengungsi Dari Negara-negara Mediterania Selatan di Kawasan Eropa. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 3(3), 547-558.
- Sugiono. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.

Suhita, W. P. (2018). *Kegagalan Operasi Mediterranean European Union Naval Force Dalam Mengurangi Peningkatan Arus Imigran ke Eropa [SKRIPSI]. Repository UMY.*

Artikel Daring

- Armandhanu, D. (2016, 02 07). *Kelompok Anti-Islam Eropa Gelar Demo Besar Tolak Imigran*. Retrieved 07 01, 2020, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160207104411-134-109384/kelompok-anti-islam-eropa-gelar-demo-besar-tolak-imigran>
- Arvin. (2016, 09 06). *PM Inggris Tolak Kontrol Imigrasi Berbasis Poin*. Retrieved 07 01, 2020, from KoranSindo: http://koran-sindo.com/page/news/2016-09-06/0/23/PM_Inggris_Tolak_Kontrol_Imigrasi_Berbasis_Poin
- Bank, T. W. (2018). *GDP Current US\$ European Union*. Washington, DC: Report Fraud or Corruption.
- Barigazzi, J. (2020, 2 17). *Operation Sophia to be closed down and replaced*. Retrieved from Politico: <https://www.politico.eu/article/operation-sophia-to-be-closed-down-and-replaced/>
- Barigazzi, J. (2020, 2 17). *Operation Sophia to be closed down and replaced*. Retrieved 05 20, 2020, from Politico: <https://www.politico.eu/article/operation-sophia-to-be-closed-down-and-replaced/>
- Barry Buzan, O. W. (1998). *Security A New Framework for Analysis*. Colorado: Lynne Rinner Publishers.
- Bartoni, L. (2017, 0 24). *Migrants From Pakistan Interviewed Along The Mediterranean Routes in 2016 and 2017*. Retrieved 05 19, 2020, from IOM: https://www.iom.int/sites/default/files/dtm/Pakistan_DTM_201711.pdf
- Barzacha, N. (2018, 08 02). *Austria now holds the E.U. presidency. Expect a tougher stance on immigration*. Retrieved from The Washington Post: <https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/08/02/austria-now-holds-the-e-u-presidency-expect-a-tougher-stance-on-immigration/>
- Barzacha, N. (2018, 08 02). *Austria now holds the E.U. presidency. Expect a tougher stance on immigration*. Retrieved 05 20, 2020, from The Washington Post: <https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/08/02/austria-now-holds-the-e-u-presidency-expect-a-tougher-stance-on-immigration/>
- Battu, V. (2019, 09 26). *EUNAVFOR MED Operation Sophia: mandate extended until 31 March 2020*. Retrieved 05 26, 2020, from European Council of the European Union: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/09/26/eunavfor-med-operation-sophia-mandate-extended-until-31-march-2020/>
- BBC. (2016, Maret 3). *Why is EU struggling with migrants and asylum?* Diambil kembali dari BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-europe-24583286>

- BBC. (2016, 03 03). *Why is EU struggling with migrants and asylum? Diambil kembali dari BBC News:*. Retrieved 05 18, 2020, from BBC: <https://www.bbc.com/news/world-europe-24583286>
- Berry, M., Garcia-Blanco, I., & Moore, K. (2015). *Press Coverage of the Refugee and Migrant Crisis in the EU: A Content Analysis of Five European Countries*. Carrdif: Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies.
- Borragan, M. C.-S. (2016). *European Union Politics (5th ed.)*. New York: Oxford University Press.
- Buzan, B. (1991). *People, States and Fear: An Agenda for Security Analysis in the PostCold War Era*. Brighton: Weatsheaf.
- Buzan, B. (1991). *People, States and Fear: An Agenda for Security Analysisi in the PostCold War Era*. Brighton: Weatsheaf.
- Buzan, B. (1998). *Security A New Framework for Analysis*. Colorado: Lynne Rinner Publishers.
- Buzan, B., Wæver, O., & Wilde, J. d. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Colorado: Lynne Reinner Publishers.
- Buzzan, B. (1998). *Security A New Framework for Analysis*. Colorado: Lynne Rinner Publishers.
- Campbell, Z. (2019, 02 08). *Europe's deadly migration strategy*. Retrieved 08 17, 2020, from Politico: <https://www.politico.eu/article/europe-deadly-migration-strategy-leaked-documents/>
- Center, P. R. (2016). *Number of Refugees to Europe Surges to Record 1.3 Million in 2015*. Washington, DC: Pew Research Center Survey Reports.
- CNN . (2015, 08 25). *Yunani Tak Punya Infrastruktur untuk Tampung Imigran*. Retrieved 07 01, 2020, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150825030956-134-74217/yunani-tak-punya-infrastruktur-untuk-tampung-imigran>
- Commision, E. (2016). *The Common European Asylum System*. Uni Eropa: Publication Office.
- Commission, E. (2013, 07 07). *Schengen Area*. Retrieved 15 28, 2020, from European Commission and Migration and Home Affairs: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en
- Commission, E. (2015). *Migrant Smuggling*. Retrieved 05 19, 2020, from European Commission: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/irregular-migration-return-policy/facilitation-irregular-migration_en
- Council of the European Union. (2018). *EUNAVFOR MED Operation Sophia: operation to contribute to better information sharing on crime in the Mediterranean*. Brussels: General Secretariat of the Council.

- Council of the European Union. (2018, 05 18). *EUNAVFOR MED Operation Sophia: operation to contribute to better information sharing on crime in the Mediterranean*. Retrieved 05 18, 2020, from Council of the European Union: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/14/eunavfor-med-operation-sophia-operation-to-contribute-to-better-information-sharing-on-crime-in-the-mediterranean>
- Dhani, A. (2016, 08 15). *Bagaimana Warga Eropa Memandang Islam*. Retrieved 07 01, 2020, from Tirto.id: <https://tirto.id/bagaimana-warga-eropa-memandang-islam-bAzu>
- DW. (2018, 06 22). *Where do EU countries stand on migration?* Retrieved from Dw.com: <https://www.dw.com/en/where-do-eu-countries-stand-on-migration/a-44356857>
- DW. (2018, 06 22). *Where do EU countries stand on migration?* Retrieved 05 20, 2020, from Dw.com: <https://www.dw.com/en/where-do-eu-countries-stand-on-migration/a-44356857>
- EE. (2016, 02 25). *Changes in modus operandi of Islamic State terrorist attacks*. Retrieved 05 18, 2020, from The Hague: Europol Public Information: <https://www.europol.europa.eu/publications-documents/changes-in-modus-operandi-of-islamic-state-terrorist-attacks>
- Eklblom, J. (2019, 10 31). *Poland, Hungary broke EU laws by refusing to host migrants: court adviser*. Retrieved 07 01, 2020, from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-europe-migration-court/poland-hungary-broke-eu-laws-by-refusing-to-host-migrants-court-adviser-idUSKBN1XA1S5>
- Estrada-Cañamares, M. (2016, 04 22). *Operation Sophia Before and After UN Security Council Resolution No 2240 (2015)*. *European Papers*, 1(1), 185-191.
- EU. (2016, 09 14). *EU OPERATIONS*. Retrieved from European Union: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/5_euoperationsinmed_2pg.pdf
- EU. (2016, 09 14). *EU OPERATIONS*. Retrieved 05 20, 2020, from European Union: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/5_euoperationsinmed_2pg.pdf
- EUNAVFOR MED. (2018, 04 10). *MISSION*. Retrieved from operationsophia.eu: <https://www.operationsophia.eu/wp-content/uploads/2018/04/Mission.pdf>
- European Commission. (2015). *Migrant Smuggling*. Retrieved from European Commission: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/irregular-migration-return-policy/facilitation-irregular-migration_en
- European Council of the European Union. (2020, 5 03). *Infographic - EU Mediterranean operations 2015-2020*. Retrieved 05 20, 2020, from <https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/saving-lives-sea-february-2018/>
- Europol. (2016). *Changes in modus operandi of Islamic State terrorist attacks*. The Hague: Europol Public Information.

- Eurostat . (2016, 03 04). *Record number of over 1.2 million first time asylum seekers registered in 2015*. Retrieved 05 15, 2020, from Eurostatnewrelease:
<https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6>
- Eurostat . (2019, 03 14). *580 800 first-time asylum seekers registered in 2018, down by 11% compared with 2017*. Retrieved 05 20, 2020, from Eurostat newsrelease:
<https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9665546/3-14032019-AP-EN.pdf/eca81dc5-89c7-4a9d-97ad-444b6bd32790>
- Eurostat. (2016, 03 04). *Record number of over 1.2 million first time asylum seekers registered in 2015*. Retrieved from Eurostat newsrelease:
<https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6>
- Eurostat. (2017, 03 16). *1.2 million first time asylum seekers registered in 2016*. Retrieved 05 18, 2020, from Eurostat newsrelease:
<https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7921609/3-16032017-BP-EN.pdf/e5fa98bb-5d9d-4297-9168-d07c67d1c9e1>
- Eurostat. (2018, 03 20). *650 000 first-time asylum seekers registered in 2017*. Retrieved 05 19, 2020, from Eurostat newsrelease:
<https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8754388/3-20032018-AP-EN.pdf/50c2b5a5-3e6a-4732-82d0-1caf244549e3>
- Eurostat. (2019, 03 14). *580 800 first-time asylum seekers registered in 2018, down by 11% compared with 2017*. Retrieved from Eurostat newsrelease:
<https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9665546/3-14032019-AP-EN.pdf/eca81dc5-89c7-4a9d-97ad-444b6bd32790>
- Eurostat. (2020, 04 07). *First-time asylum application in the EU27 (Q4-2019)*. Retrieved 05 20, 2020, from Eurostat Statistics Explained:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics
- FRONTEX. (2018, 02). *Migratory Routes*. Retrieved from FRONTEX EUROPEAN BORDER AND COAST GUARD AGENCY:
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2019.pdf
- FRONTEX. (2018, 02). *Migratory Routes*. Retrieved from FRONTEX EUROPEAN BORDER AND COAST GUARD AGENCY:
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2019.pdf
- FRONTEX. (2018, 02). *Migratory Routes*. Retrieved from FRONTEX EUROPEAN BORDER AND COAST GUARD AGENCY:
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2019.pdf
- FRONTEX. (2018, 02). *Migratory Routes*. Retrieved 05 21, 2020, from FRONTEX EUROPEAN BORDER AND COAST GUARD AGENCY:

https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2019.pdf

Hasan, A. M. (2019, 08 06). *Gerakan Rompi Hitam Melawan Paranoia Anti-Imigran di Perancis*. Retrieved 07 01, 2020, from Tirto.id: <https://tirto.id/gerakan-rompi-hitam-melawan-paranoia-anti-imigran-di-perancis-efGh>

House Of Lords. (2017). *Operation Sophia: a failed mission*. London: Authority of the House of Lords. Retrieved from 2017.

House Of Lords. (2017). *Operation Sophia: a failed mission*. Parliament UK. London: Authority of the House of Lords.

Ikbar, Y. (2014). *Metodologi dan Teori Hubungan Internasional*. Bandung: Refika Aditama.

Ikbar, Y. (2014). *Metodologi dan Teori Hubungan Internasional*. Bandung: Refika Aditama.

IOM. (2017, 10). *Flow Monitoring Surveys : The Human Trafficking and other Exploitative Practices Idication survei*. Retrieved 05 21, 2020, from International Organization for Migration: Downloads\Documents\FMS_human_trafficking_and_other_exploitative_practic es_Central_and_Eastern Med_November_2017.pdf

IOM. (2020). *Who is a migrant?* Diambil kembali dari IOM UN Migration: <https://www.iom.int/who-is-a-migrant>

Juncker. (2015, 09 09). *State of the Union 2015*. Retrieved from European Commission: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/state_of_the_union_2015_en.pdf

Juncker. (2015, 09 09). *State of the Union 2015*. Retrieved 05 21, 2020, from European Commission: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/state_of_the_union_2015_en.pdf

Kaminski, M. (2015, 11 23). *All the terrorists are migrants*. Retrieved 07 1, 2020, from Politico: <https://www.politico.eu/article/viktor-orban-interview-terrorists-migrants-eu-russia-putin-borders-schengen/>

Kington, T. (2017, 02 14). *Video Shows Libyan coastguard whipping rescued migrants*. Retrieved from The Times: <https://www.thetimes.co.uk/edition/world/video-shows-libyan-coastguard-whipping-rescued-migrants-6d8g2jgz6>

Kington, T. (2017, 02 14). *Video Shows Libyan coastguard whipping rescued migrants*. Retrieved 05 20, 2020, from The Times: <https://www.thetimes.co.uk/edition/world/video-shows-libyan-coastguard-whipping-rescued-migrants-6d8g2jgz6>

Lestari, P. (2018). Frontex (European Border Coast and Guard Agency) Securitization Agenda in Greece Illegal Immigrant Crisis. *JOM FISIP UNRI*, 1-15.

- Lestari, P. (2018). Frontex (European Border Coast and Guard Agency) Securitization Agenda in Greece Illegal Immigrant Crisis. *JOM FISIP UNRI*, 5(1), 1-15.
- Makhroja, M. N. (2020). Sekuritisasi Isu Migrasi di Polandia Pasca Krisis Pengungsi di Uni Eropa. *IJPSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies*, 2(1), 1-15.
- Mcdonald-Gibson, C. (2015, 01 08). *Europe's Anti-Immigrant Parties Make Hay From Paris Terrorist Attack*. Retrieved 07 1, 2020, from Time: <https://time.com/3659471/paris-terror-attack-europe-far-right-populist/>
- Med, E. (2018, 04 10). *MISSION*. Retrieved 05 20, 2020, from operationsophia.eu: <https://www.operationsophia.eu/wp-content/uploads/2018/04/Mission.pdf>
- Medistiara, Y. (2015, 10 15). *Ini Sejumlah Peristiwa Teror di Paris Sejak Pembantaian Charlie Hebdo*. Retrieved 07 1, 2020 , from News.detik.com: <https://news.detik.com/internasional/d-3071340/ini-sejumlah-peristiwa-teror-di-paris-sejak-pembantaian-charlie-hebdo>
- Mike Berry, I. G.-B. (2015). *Press Coverage of the Refugee and Migrant Crisis in the EU: A Content Analysis of Five European Countries*. Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies. Carrdif: Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies.
- Monar, J. (2001). The Dynamics of Justice and Home Affairs: Laboratories, Driving Factors and Costs. *Journal of Common Market Studies*, 39(4), 747-764.
- Nadifah, S. (2018, 05 01). *Problematika Imigran Suriah Ke Eropa, Keuntungan atau Kerugian?* Retrieved 05 18, 2020, from Diambil kembali dari Foreign Policy Community of Indonesia: Indonesia: <https://www.fpciupnvj.com/problematika-imigran-suriah-ke-eropa-keuntungan-atau-kerugian/>
- Nafidah, S. (2018, Mei 1). *Problematika Imigran Suriah ke Eropa, Keuntungan atau Kerugian?* Diambil kembali dari Foreign Policy Community of Indonesia: <https://www.fpciupnvj.com/problematika-imigran-suriah-ke-eropa-keuntungan-atau-kerugian/>
- NN-BBC. (2016, 03 04). *Migrant crisis: Migration to Europe explained in seven charts*. Retrieved 11 05, 2020, from bbc.com: <https://www.bbc.com/news/world-europe-34131911>
- OHCHR. (2016, 12 13). *“Detained and Dehumanised” Report on human rights abuses against migrants in Libya*. Retrieved from United Nations Support Mission in Libya and United Nations Human Rights Office of the High: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/DetainedAndDehumanised_en.pdf
- OHCHR. (2016, 12 13). *“Detained and Dehumanised” Report on human rights abuses against migrants in Libya*. Retrieved 05 20, 2020, from United Nations Support Mission in Libya and United Nations Human Rights Office of the High: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/DetainedAndDehumanised_en.pdf

- Panebianco, S. (2016, 01). *The Mare Nostrum and The SAR Approach: The Italian Response to Address the Mediterranean Migration Crisis*. Retrieved 05 18, 2020, from http://www.dsps.unict.it/sites/default/files/files/panbianco_EUMedEA_JMWP_03_3016_.pdf
- Parliament, E. (1999, 10). *TAMPERE EUROPEAN COUNCIL 15 AND 16 OCTOBER 1999*. Retrieved 05 17, 2020, from European Parliament: https://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm
- Patnistik, E. (2012, 03 27). *Dua Juta Orang Lari dari Dunia Arab ke Eropa*. Retrieved 05 16, 2020, from Kompas.com: [https://travel.kompas.com/read/2012/03/27/10052371/dua.juta.orang.lari.dunia.arab.ke.eropa](https://travel.kompas.com/read/2012/03/27/10052371/dua.juta.orang.lari.dari.dunia.arab.ke.eropa)
- Patnistik, E. (2012, 03 27). *Dua Juta Orang Lari dari Dunia Arab ke Eropa*. Retrieved 05 16, 2020, from Kompas: <https://travel.kompas.com/read/2012/03/27/10052371/dua.juta.orang.lari.dari>.
- Pen, M. L. (2015, 01 08). *Marine Le Pen blames radical Islamism for Charlie Hebdo attack – video*. Retrieved 07 01, 2020, from The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/video/2015/jan/08/marine-le-pen-radical-islamism-charlie-hebdo-attack-video>
- Pertiwi, L. A. (2016, 3). Kompleksitas Rezim di Uni Eropa: Upaya Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(3), 218-233.
- Pertiwi, L. A. (2016, 03). Kompleksitas Rezim di Uni Eropa: Upaya Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(3), 218-283. Retrieved from *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Pratiwi, T. S. (2018). Sekuritisasi Penanganan Isu Pengungsi di Swedia: Berhasil atau Gagalkah? *Dauliyah*, 243-244.
- Puspita, C. S. (2015, 09 10). *Ada Apa di Balik Kedermawanan Jerman kepada Imigran?* Retrieved 05 20, 2020, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150910145740-134-77901/ada-apa-di-balik-kedermawanan-jerman-kepada-imigran/>
- Republika. (2015, 09 11). *Habis Arab Spring, Terbitlah Krisis Pengungsi*. Retrieved 05 18, 2020, from Republika: <https://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/15/09/11/nui3gg21-habis-arab->
- REPUBLIKA. (2015, 09 11). *Habis Arab Spring, Terbitlah Krisis Pengungsi*. Retrieved 05 15, 2020, from REPUBLIKA.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/15/09/11/nui3gg21-habis-arab->
- Royanda, N. (2019). *Kebijakan Uni Eropa Terhadap Krisis Pengungsi: Analisis Sekuritisasi Dalam Pembentukan EU-Turkey Statement [SKRIPSI]*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia: Tidak Terbit.

- Roynanda, N. (2019, 02 18). Kebijakan Uni Eropa Terhadap Krisis Pengungsi: Analisis Sekritisasi Dalam Pembentukan EU-Turkey Statements. *Dspace UII*, 1-85.
- RT. (2016, 2 6). *Dozens arrested as Pegida anti-migrant marches sweep across Europe*. Retrieved from RT Question More: <https://www.rt.com/news/331586-pegida-anti-migrant-demonstrations-europe/>
- S., A. K. (2015). Upaya Uni Eropa dalam Menangani Pengungsi dari Negara-Negara Mediterania Selatan di Kawasan Eropa. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional Vol. 3*, 547-558.
- Samosir, H. A. (2015, 09 08). *Mengapa Imigran ke Eropa, Bukan ke Timur Tengah*. Retrieved 5 15, 2020, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150908131728-134-77324/mengapa-imigran-ke-eropa-bukan-ke-timur-tengah>
- Samosir, H. A. (2015, 09 08). *Mengapa Imigran Ke Eropa, Bukan Ke Timur Tengah*. Retrieved 05 15, 2020, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150908131728-134-77324/mengapa-imigran-ke-eropa-bukan-ke-timur-tengah>
- Saputra, E. Y. (2018, 06 30). *Ini Pokok Kesepakatan Uni Eropa untuk Tangani Imigran*. (M. R. Hasugian, Editor, & PT. Tempo Media Group) Retrieved 05 16, 2020, from TEMPO.CO: <https://dunia.tempo.co/read/1102257/ini-pokok-kesepakatan-uni-eropa-untuk-tangani-imigran>
- Saputra, E. Y. (2018, 06 30). *Ini Pokok Kesepakatan Uni Eropa untuk Tangani Imigran*. Retrieved 05 18, 2020, from Tempo.co: <https://dunia.tempo.co/read/1102257/ini-pokok-kesepakatan-uni-eropa-untuk-tangani-imigran>
- Sari, A. K. (2015). Upaya Uni Eropa dalam Menangani Pengungsi Dari Negara-negara Mediterania Selatan di Kawasan Eropa. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 3(3), 547-558.
- Sari, A. P. (2015, 09 10). *Ada Apa di Balik Kedermawanan Jerman kepada Imigran?* Retrieved 05 20, 2020, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150910145740-134-77901/ada-apa-di-balik-kedermawanan-jerman-kepada-imigran/>
- Schaart, E. (2018, 11 14). *Czech Republic latest EU country to reject UN migration treaty*. Retrieved 07 01, 2020, from Politico: <https://www.politico.eu/article/czech-republic-migration-refugees-latest-eu-country-to-reject-united-nations-treaty/>
- Suastha, R. D. (2017, 02 08). *Mayoritas Warga Eropa Dukung Larangan Imigrasi Negara Muslim*. Retrieved 07 01, 2020, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170208115652-134-192050/mayoritas-warga-eropa-dukung-larangan-imigrasi-negara-muslim>
- Sugiono. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.

- Sugiono. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.
- Suhita, W. P. (2018). *Kegagalan Operasi Mediterranean European Union Naval Force Dalam Mengurangi Peningkatan Arus Imigran ke Eropa [SKRIPSI]*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Tidak Terbit.
- Suhita, W. P. (2018). *Kegagalan Operasi Mediterranean European Union Naval Force Dalam Mengurangi Peningkatan Arus Imigran ke Eropa [SKRIPSI]*. *Repository UMY*.
- Tardy, T. (2017, 11). *Operation Sophia's world Changes and Challenges*. Retrieved from European Union Institute for Security Studies (EUISS): https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief%2032%20Operation%20Sophia_0.pdf
- Tardy, T. (2017, 11). *Operation Sophia's world Changes and Challenges*. Retrieved 05 20, 2020, from European Union Institute for Security Studies (EUISS): https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief%2032%20Operation%20Sophia_0.pdf
- Traynor, I. (2015, 09 03). *Migration crisis: Hungary PM says Europe in grip of madness*. Retrieved from Theguardian.com: <https://www.theguardian.com/world/2015/sep/03/migration-crisis-hungary-pm-victor-orban-europe-response-madness>
- Traynor, I. (2015, 09 03). *Migration crisis: Hungary PM says Europe in grip of madness*. Retrieved 05 20, 2020, from Theguardian.com: <https://www.theguardian.com/world/2015/sep/03/migration-crisis-hungary-pm-victor-orban-europe-response-madness>
- Tusk, P. r. (2016, 03 18). *Remarks by President Donald Tusk after the meeting of the EU heads of state or government with Turkey*. Retrieved from European Council of the European Union: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/tusk-remarks-after-euco-turkey/>
- Tusk, P. r. (2016, 03 18). *Remarks by President Donald Tusk after the meeting of the EU heads of state or government with Turkey*. Retrieved 05 20, 2020, from European Council of the European Union: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/tusk-remarks-after-euco-turkey/>
- Tusk, P. S. (2017, 12 15). *Remarks by President Donald Tusk following the European Council meetings on 14 and 15 December 2017*. Retrieved from European Council of the European Union: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/15/remarks-by-president-donald-tusk-on-the-european-council-meetings-on-14-and-15-december-2017/>
- Tusk, P. S. (2017, 12 15). *Remarks by President Donald Tusk following the European Council meetings on 14 and 15 December 2017*. Retrieved 05 20, 2020, from European Council of the European Union: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/15/remarks-by->

president-donald-tusk-on-the-european-council-meetings-on-14-and-15-december-2017/

UNHCR. (2015, Juli 1). *The sea route to Europe: The Mediterranean passage in the age of refugees*. Diambil kembali dari UNHCR: The UN Refugee Agency: <https://www.unhcr.org/protection/operations/5592bd059/sea-route-europe-mediterranean-passage-age-refugees.html>

UNHCR. (2015, 07 01). *The sea route to Europe;The Mediterranean passage in the age of refugees*. Retrieved 05 18, 2020, from The UN Refugee Agency: <https://www.unhcr.org/protection/operations/5592bd059/sea-route-europe-mediterranean-passage-age-refugees.html>

UNHCR. (2016, 05 20). *Europe Refugee Crisis 2015*. Retrieved 05 20, 2020, from UNHCR The Un Refugee Agency: <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/576408cd7.pdf>

Ventrella, a. (2016, 08 05). *The impact of Operation Sophia on the exercise of criminal jurisdiction against migrant smugglers and human traffickers*. Retrieved 05 20, 2020, from Questions of International Law: <http://www.qil-qdi.org/impact-operation-sophia-exercise-criminal-jurisdiction-migrant-smugglers-human-traffickers/>

Ventrella, A. (2016, 08 05). *The impact of Operation Sophia on the exercise of criminal jurisdiction against migrant smugglers and human traffickers*. Retrieved from Questions of International Law: <http://www.qil-qdi.org/impact-operation-sophia-exercise-criminal-jurisdiction-migrant-smugglers-human-traffickers/>

VOA. (2016, 02 07). *Demonstrasi Anti-Migran Berlangsung di Beberapa Kota Utama di Eropa*. Retrieved 07 01, 2020, from VOA: <https://www.voaindonesia.com/a/demonstrasi-anti-migran-berlangsung-di-beberapa-kota-utama-di-eropa/3180324.html>

Wæver, O. (1993). Societal Security: The Concept. In O. Wæver, B. Buzan, M. Kelstrup, & P. Lemaitre, *Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe* (pp. 23-27). New York: St. Martin's Press.

Wæver, O. (1993). *Societal Security: The Concept*. In O. Wæver, B. Buzan, M. Kelstrup, & P. Lemaitre, *Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe*. New York: St. Martin's Press.

Wiwoho, L. H. (2018, 07 05). *"Open Policy" Angela Merkel, Dua Sisi Kedatangan Imigran ke Jerman*. Retrieved 07 01, 2020, from Kompas.com: <https://internasional.kompas.com/read/2018/07/05/21171051/open-policy-angela-merkel-dua-sisi-kedatangan-imigran-ke-jerman?page=all>

Worley, W. (2016, 01 27). *Six out of 10 migrants to Europe come for 'economic reasons' and are not refugees, EU Vice President Frans Timmermans say*. Retrieved 05 18, 2020, from The Independent: <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/six-out-of-10->

Worley, W. (2016, Januari 27). *Six out of 10 migrants to Europe come for 'economic reasons' and are not refugees, EU Vice President Frans Timmermans says*. Diambil kembali dari The Independent:
<https://www.independent.co.uk/news/world/europe/six-out-of-10-migrants-to-europe-come-for-economic-reasons-and-are-not-refugees-eu-vice-president-a6836306.html>

Zuraya, N. (2018, 07 21). *Spanyol Anggarkan Rp 500 Miliar untuk Tangani Pengungsi*. Retrieved 07 01, 2020, from Republika:
<https://www.republika.co.id/berita/internasional/eropa/18/07/31/pcp2im383-spanyol-anggarkan-rp-500-miliar-untuk-tangani-pengungsi>

